

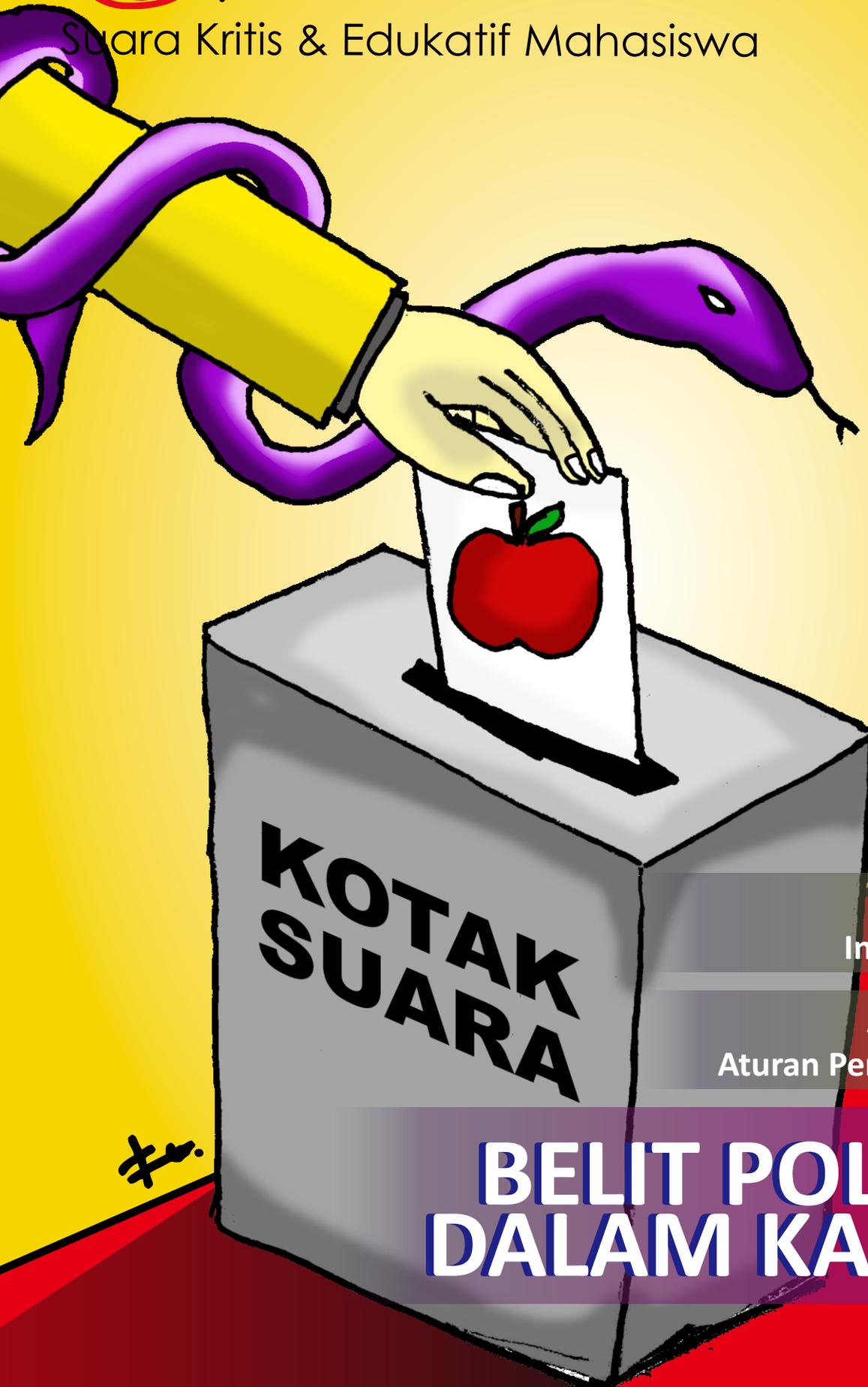
MAJALAH  
**Sketsa**

Suara Kritis & Edukatif Mahasiswa

Edisi

**35**

April 2019



Krisis Netralitas  
Independensi Goyah?

ASN Dalam Kemelut  
Aturan Pemilu dan Kebebasan

**BELIT POLITIK  
DALAM KAMPUS**

# DAFTAR ISI

Salam Persma

1

Struktur Lembaga

2

## Laporan Utama

3



**ASN Dalam Kemelut  
Aturan Pemilu dan Kebebasan**

## Laporan Utama

**Aturan Dalam  
Ruang Gerak Politik**

9

**Menilik Jejak Politik  
Praktis di Unmul**

12

**Mahasiswa dan Isu  
Jemari Politik**

16

## Laporan Utama

**Krisis Netralitas  
Independensi Goyah?**

20

**Mengabahkan Peran  
Mahasiswa dalam Pemilu**

23

**Peran Relawan Demokrasi  
Demi Tingkatan Partisipasi**

25

## Laporan Utama

**Menengok Unmul  
dalam Sejarah  
Kaidah ASN**

27



## Wawancara Khusus

**Taufik: Sudah Terlalu  
Banyak Teori,  
Saatnya Praktik**

29



# DAFTAR ISI

## Opini



**Menjaga Muruah dan  
Netralitas Kampus**

32

## Litbang

**Hasil Survei Praktisi  
Politik di Unmul**

34

## Lifestyle

**Melihat Tren  
Caleg Milenial**

39

## Infografis

**Jenis-jenis  
Pelanggaran Pemilu**

22

**Proses Penanganan  
Pelanggaran Pemilu**

41

## Komunitas

**Aksi Kamisan,  
Melawan Diam  
dengan Menuntut  
Keadilan**

29



## Sastra

**(CERPEN) Secuil Kultur  
Semasa Kampanye**

46

**(PUISI)  
Kaum Putih**

48

## Iptek

**Plagtracker,  
Aplikasi Modern  
Deteksi Plagiarisme**

44



## Sosok

**Keluar dari Zona  
Nyaman, Ainur  
Rebut Gelar Mawapres**

49

# MAJALAH Sketsa

Suara Kritis & Edukatif Mahasiswa

EDISI #35

Diterbitkan oleh Lembaga Pers Mahasiswa  
(LPM) Sketsa Universitas Mulawarman

#### ALAMAT

Gedung Student Center Unmul Lt. 2  
Jl. Barong Tongkok, Samarinda 75123

#### EMAIL

sketsaunmul@gmail.com

#### WEBSITE

sketsaunmul.co

#### FB

LPM Sketsa Unmul

#### TWITTER

@SketsaUnmul

#### LINE

@sketsaunmul

#### YOUTUBE

sketsaunmuldotco

## Salam Persma!

Sudah seharusnya kaum akademisi meleak politik, termasuk di momentum pertarungan politik saat ini. Sebagai kaum yang terdidik, lapisan civitas academica tentunya harus memahami perannya dalam memeriahkan pesta demokrasi. Namun keterlibatan ini bukan berarti dapat dilakukan sebebas-bebasnya.

Salah satu yang penting adalah menjaga muruah kampus agar tetap netral, tak diselipkan tindakan politik praktis. Namun sayangnya Unmul masih belum sepenuhnya terhindar dari tindakan politik praktis oleh orang-orang di dalamnya. Kampus terbesar di Kalimantan Timur ini masih kecolongan. Beberapa waktu belakangan ramai Unmul diperbincangkan terkait keterlibatan ASN-nya dalam sebuah kegiatan kampanye dan dukungannya untuk salah satu kubu. Hal ini tentunya bertentangan dengan aturan yang telah mengikat status ASN yang tengah diemban.

Bukan hanya keterlibatan ASN, kampus juga masih menjadi celah agar mendapatkan dukungan. Adanya ribuan mahasiswa seakan nampak sebagai lumbung suara yang menggiurkan. Namun bukan berarti mahasiswa tak dapat berpolitik, justru peran mahasiswa diperlukan. Salah satunya dengan ikut mengawal dan mengajak berdemokrasi sebagai relawan dari KPU.

Pentingnya menyeimbangkan hasrat politik saat di dalam dan di luar kampus masih menjadi pekerjaan bersama. Kesadaran dan pengetahuan akan aturan harus diterapkan. Sebab aturan menegaskan ruang gerak dan menjadi landasan dalam bertindak.



Download  
Majalah  
PDF Sketsa  
edisi #34  
di:

sketsa-  
unmul.co

#### Layouter Majalah:

Fernanda Fadhila, Eka Rizki Prabowo, M. Faqih Hendrian Hutomo,  
Syahrani, Laij, Ferren Novelin, Prima Hidayat Tajuddin,  
Yusuf Nikhita

#### Illustrator Majalah:

Fernanda Fadhila



# STRUKTUR LEMBAGA PERS MAHASISWA SKETSA UNMUL 2019

<b>Pelindung</b>	Dr. Ir. Encik Akhmad Syaifudin, M.P
<b>Pembina</b>	Dr. Sudarman, S.Pd., M.Pd. Herdiansyah Hamzah, S.H., LL.M.
<b>Ketua Umum</b>	Uswatun Hasanah
<b>Sekretaris</b>	Mahmudhah Syarifatunnisa
<b>Bendahara</b>	Siti Istaqul Mutafsiroh
<b>Ketua Redaksi</b>	Fadiyah Adlina
<b>Redaktur Pelaksana</b>	M. Faqih Hendrian Hutomo Nur Elisha William Maliki
<b>Redaktur Online</b>	Christnina Maharani Hilda Annisa Nur F.
<b>Ketua Biro Iklan dan Pemasaran</b>	Mahameru Primantoro
<b>Staf</b>	Novita, Siti Jubaidah, A'yun, Aulia
<b>Ketua Divisi Litbang</b>	Suti Sri Hardiyanti
<b>Staf</b>	Ariani, Eka, Yuli, Alma, Ratih, Huma, Restu, Fathan, Asyura, Venny
<b>Ketua Divisi Produksi</b>	Shafira Pandu Winata
<b>Staf</b>	Adnin, Ajey, Syahrani, Fajar, Zayyan, Rahman, Rani, Gia, Andi, Eqi
<b>Fotografer</b>	Diyah, Nina, Rosmi, Tia, Aisyah, Erzha, Erlina, Yuzar
<b>Desainer</b>	Dian, Yusuf, Fernan, Prima, Hezky, Ferren
<b>Reporter</b>	Ninis, Aisyah, Ayu, Putera, Khusnul, Nanda, Yasmin, Briandena, Fauzan, Samuel, Khusairi, Feti, Arief, Halimatusya', Hijrana

Ilustrasi: Fernan



## ASN dalam Kemelut Aturan Pemilu dan Kebebasan

*Menyambut pemilu yang tinggal menghitung hari, muncul kabar yang turut meramaikan pesta demokrasi. Bukan hanya tentang mereka yang akan maju di kursi petinggi, namun juga soal pelanggaran yang disebut-sebut datang dari kaum akademisi. Belum lama ini, dugaan keterlibatan aparat sipil negara (ASN) Unmul dalam pemilihan umum (pemilu) jadi pembicaraan. Dua dosen yang berstatus ASN terseret isu perpolitikan. Hal ini jelas tak diperkenankan, sebab semua berangkat dan telah ditetapkan dalam aturan.*

**P**elanggaran yang menyertai jalannya tahapan pemilu memang bukan hal yang baru. Baik itu yang berkaitan dengan tahapan pendaftaran, kampanye, pemungutan suara, bahkan hingga pasca pemilu. Belakangan ini Unmul kembali menjadi sorotan akibat munculnya dugaan keterlibatan ASN-nya dalam kampanye di tahun politik ini. Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 2 Huruf F menjabarkan bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepentingan siapapun. Selain itu, mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dalam Pasal 280 Ayat 1 dan 2, ada dua hal yang dilarang untuk ASN, yakni dilarang melibatkan diri secara aktif dalam kampanye pemilu serta peserta pemilu dilarang melibatkan ASN dalam kampanye. Hal ini kemudian membuat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meningkatkan perannya untuk menindak segala pelanggaran yang terjadi.

MI, salah satu dosen Fakultas Ekonomi dan

Bisnis (FEB) diduga terlibat dalam kegiatan yang digelar oleh salah satu calon legislatif (caleg) Partai Golkar. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Gedung Do Jong, Taekwondo, Samarinda pada awal Maret lalu. Menurut keterangan caleg tersebut, acara itu bukanlah sebuah kampanye, melainkan bimbingan teknis (bimtek) untuk para saksi partai di tempat pemungutan suara (TPS).

Tak lama setelah kasus MI beredar, disusul kabar dari EI yang merupakan dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP). Dugaan pelanggaran yang dilakukan EI diketahui saat videonya dalam salah satu kegiatan yang digelar tim pendukung salah satu paslon capres dan cawapres diunggah di Youtube. Dalam video tersebut, EI dengan terang-terangan mengatakan berstatus ASN dan memberikan dukungannya untuk paslon tersebut. EI diketahui saat ini tengah menempuh pendidikan di Malaysia. Video yang beredar juga diambil di sana.

## MI: Saya Tidak Gila

"Saya diundang ke sana," ungkap MI kepada Sketsa pada siang (21/3). MI membantah dengan tegas terkait isu yang menyebut dirinya terlibat dalam kegiatan kampanye. Ia mendapatkan undangan untuk hadir sebagai pemateri bimbingan teknis (bimtek) penyampaian laporan perolehan suara. Kegiatan hari itu juga dikatakannya sudah mengantongi ijin Bawaslu. Bahkan Bawaslu dan kepolisian pun ikut memantau keberlangsungan kegiatan tersebut.

Ia mengaku sudah sejak lama menjadi pemateri saat pemilu berlangsung. Tepatnya sejak 2009 silam. MI menjelaskan, keahliannya di bidang survei dan penelitian yang menjadikannya kerap diundang sebagai pemateri. MI juga mengungkapkan bahwa ASN-nya dosen berbeda dengan ASN lainnya.

"Yang berbeda adalah peran tridarma yang dosen emban," tambahnya. Tridarma seorang dosen dalam artinya tugasnya dalam mengajar, melakukan penelitian, dan yang terakhir pengabdian. Ia mengklaim, yang ia lakukan saat itu adalah salah satu bentuk mengajar. Menurutnya, tidak semua pengawas di luar tempat pemungutan suara (TPS) berpendidikan, sehingga sangat penting untuk melakukan pengajaran agar kegiatan pemilu April ini berjalan dengan lancar.

Selain itu, beberapa waktu lalu, nampak mobil dengan stiker caleg terparkir di FEB. Caleg tersebut juga diketahui yang mengundang MI pada acara bimtek tempo hari. "Itu bukan mobil saya," ujarnya.

MI menduga itu merupakan mobil mahasiswa dan tidak ada yang salah dengan itu. Menurutnya, selagi tidak ada ajakan, tidak ada masalah jika atribut kampanye berupa mobil tersebut masuk ke dalam wilayah kampus.

Ia mengaku setuju terkait aturan yang menyatakan bahwa ASN dilarang terlibat dalam kegiatan politik. "Saya tidak gila, sampai harus

melanggar larangan yang sudah jelas," tutur MI.

Sementara EI, menolak memberikan konfirmasi. Saat dihubungi awak Sketsa pada (19/3) ia sempat membalas pesan untuk menanyakan topik apa yang akan dibahas, namun setelah itu EI tak lagi membalas pesan dan atau merespons saat ditelepon. Dilansir dari laman *Kaltim Post*, EI mengaku acara tersebut merupakan diskusi, bukan kampanye. Sedang relawan yang ia maksud ialah relawan untuk kongko-kongko untuk keperluan diskusi.



**Abdunnur**  
Wakil Rektor II

## Dukungan Pihak Rektorat

Pihak Unmul turut kebersamai proses penyelesaian kasus ini. Wakil Rektor Bidang Umum, Sumber Daya Manusia, dan Keuangan, Abdunnur menjelaskan, MI hadir dalam acara bimbingan teknis tersebut sebagai pemateri. Adapun materi yang dibawakan terkait *quick count* dalam perhitungan suara. Baginya sah-sah saja sebagai akademisi, MI menerima tawaran undangan secara resmi.

Sesat setelah mengetahui kabar adanya dugaan keterlibatan ASN Unmul dalam kampanye, pihaknya langsung melakukan pemanggilan terhadap dosen bersangkutan untuk dimintai keterangan. MI kemudian memberikan klarifikasi langsung, bahwa benar ia menghadiri acara tersebut. Namun hanya sebagai pemateri, bukan terlibat dalam tindakan kampanye. "Kemarin (MI) hadir, langsung datang menyampaikan klarifikasi menghadiri acara

tersebut sebagai pemateri dan mengisinya sesuai dengan substansi," kata Abdunnur saat diwawancarai.

MI juga sudah menerima panggilan Bawaslu untuk memberikan keterangan. Dalam panggilan tersebut, mewakili Masjaya Rektor Unmul, Kepala Biro Umum dan Keuangan, Rizali Irawan juga hadir dalam panggilan Bawaslu (12/3) untuk memberikan keterangan, bahwa MI memang benar merupakan tenaga pengajar di Unmul.

Sejauh ini, pihaknya akan mengikuti proses yang sedang berlangsung dan menunggu hasil keputusan dari Bawaslu. Terlebih, dalam kasus ini membutuhkan konfirmasi dari berbagai pihak. Ia juga menilai, isu yang beredar saat ini tidak sesuai. Menurutnya, dari sebuah dokumentasi dapat menimbulkan banyak asumsi, seperti yang dialami MI. Bahkan, baginya konyol jika seorang ASN terlibat kampanye dengan risiko diberhentikan dari jabatannya.

"Sebetulnya bisa saja yang menyebarkan (foto/informasi) dijerat UU ITE jika tidak benar. Konsekuensi pegawai negeri terlibat maka akan diberhentikan, konsekuensi itu terlalu besar (jika) hanya untuk (soal) memihak," tambahnya.

Sama halnya dengan MI, EI yang kini dalam masa studi S3 di Malaysia, diduga terlibat kampanye politik dalam sebuah forum yang digagas oleh tim pendukung salah satu pasangan capres dan cawapres. Berdasarkan video yang diunggah oleh *Ulama Daily Life* di kanal Youtube dengan judul "*Kocak!!! Rocky Gerung Full Pidato di Kuala Lumpur, Malaysia*", dalam tayangan video tersebut, pada durasi 1 jam lewat 15 menit, EI mengatakan bahwa ia telah membentuk relawan salah satu pasangan capres dan cawapres dengan ikhlas.

"Saya ASN, saya siap korbakan jiwa dan raga," ujar EI.

Menanggapi hal ini, Abdunnur menjawab dengan santai. Menurutnya hal itu bisa terjadi, apalagi saat sedang bergurau. Dia bahkan

menganggap ada pihak lain yang entah sengaja atau tidak memviralkan tayangan yang akhirnya membuat penonton berspekulasi EI mendukung salah satu paslon. Namun, sama halnya dengan MI, Unmul juga telah bersurat untuk meminta keterangan langsung dari EI.

Baginya, tidak bisa menilai satu persoalan dari satu sisi saja, sehingga mendengarkan keterangan dari yang bersangkutan sangat penting. Namun karena EI sedang berada di luar negeri, keterangan diminta secara tertulis. Surat sudah dikirimkan sejak Senin (18/3), dan ketika *Sketsa* menemui Abdunnur pada (20/3) lalu, belum ada balasan, sehingga pihaknya belum bisa melakukan penindakan.

"Sama dengan MI, kalau kita hanya melihat dari video saja, tentu orang gampang membuat opini atau men-*judge* tanpa melihat secara komprehensif," terang Abdunnur.

Nantinya setelah menerima keterangan dari dosen yang bersangkutan baik lisan maupun tertulis, dan terindikasi pelanggaran, maka akan diberikan surat peringatan dan teguran. Kemudian jika yang bersangkutan memiliki tendensi, benar melakukan pelanggaran, akan dikirim rekomendasi kasus ke Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Kemenristekdikti kemudian dilakukan rapat komisi. Jika didapatkan hasil pelanggaran, maka yang bersangkutan akan diberhentikan sebagai ASN.

Sejauh ini, pihak Unmul terus mengkaji dan mempelajari kasus ini, baik dari ASN yang bersangkutan maupun juga keterangan dari Bawaslu. Dalam artian mengomunikasikan proses yang dilakukan, telah sesuai atau tidak. Karena jika terbukti tidak benar, menurut Abdunnur yang bersangkutan bisa menuntut pencemaran nama baik.

"Kita juga punya kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi staf kita. Itu menjadi hak pegawai juga. Kalau pegawai kita disalahkan padahal tidak melakukan, lembaga harus

melakukan perlindungan atau mengklarifikasi," imbuhnya.

Berbagai upaya pun dilakukan untuk mencegah kejadian ini bisa terjadi. Seperti pada tiap kesempatan baik itu upacara maupun rapat dengan ASN di Unmul selalu disampaikan bahwa ada aturan yang mengikat ASN. Harapannya tidak ada yang memihak, apalagi ikut berkampanye. Jadi, sewaktu ada yang melanggar, itu sudah menjadi tanggung jawab pribadi.



**Muhammad Noor**  
*Dekan FISIP*

## **Fakultas Tak Dilibatkan Langsung**

Muhammad Noor Dekan FISIP Unmul turut menanggapi perihal kasus yang tengah membelit salah satu pegawainya. Dikatakan Noor, EI telah menempuh pendidikan di luar negeri sekitar pertengahan tahun lalu. Ia juga mengaku sejauh ini tidak terlibat langsung dengan penyelesaian kasus, karena langsung dibawa ke rektorat. Ia hanya menerima surat tembusan dari Encik Akhmad Syaifudin Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan dan Alumni tertanggal 12 Maret.

"Sejauh ini penyelesaian diambil alih oleh pihak rektorat. Saya baru dapat beberapa hari yang lalu, surat tembusan dari Wakil Rektor III yang menyatakan bahwa ada surat dari Bawaslu Samarinda yang mempertanyakan identitas EI," ujarnya pada (22/3) lalu.

Noor beranggapan, berbicara kasus ini sama dengan berbicara soal aturan. Dalam aturan jelas tentang larangan keterlibatan ASN dalam pemilu ini. Menurutnya, sudah seharusnya ASN tunduk dan

patuh pada aturan yang berlaku. Sebab tidak ada kewenangan untuk berpandangan lain, karena telah ditetapkan dalam undang-undang.

Ia mengaku mengetahui kabar ini dari seorang wartawan. Disinggung perihal pendapatnya terkait video EI, Noor mengaku tidak dapat mendengar dengan jelas apa yang dibicarakan EI dalam video itu. "Rekaman yang ada di saya tidak begitu jelas suaranya, jadi saya tidak yakin bisa berkomentar," ujarnya.

Selama ia menjadi dosen di FISIP, baru kali ini ia mendengar keterlibatan dari ASN FISIP dalam pemilu. Hal ini tentunya berbeda dengan masa orde baru, di mana ASN diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Meski begitu, ia turut menyayangkan keterlibatan ASN dalam mewarnai tahun politi kini.

"Belajar dari pengalaman ini. Mengingat dosen di FISIP ini relatif sedikit. Sehingga kalau sampai ada yang terlibat kasus semacam ini, kami sangat menyayangkan. Kami mengingatkan antar teman, tentang peraturan UU agar sedapat mungkin dipatuhi. Karena risikonya berat secara pribadi, dan berimplikasi kepada lembaga," tutupnya.

*Sketsa* juga berupaya mengonfirmasi Dekan FEB Syarifah Hidayah. Namun hingga tulisan ini diturunkan, Syarifah belum dapat ditemui dengan alasan kesibukan. Begitu juga dengan pesan yang dikirimkan, tak kunjung diberi balasan.

## **Adanya Pengakuan yang Berbeda, dan Mengurai Benang Dugaan Keterlibatan**

Kasus MI ditangani dari dua sisi, yaitu etik dan pidana. Untuk sanksi etik, ditangani langsung oleh Bawaslu Samarinda. Sedang untuk pidana, diselidiki oleh Bawaslu Kaltim. Pada akhir Maret lalu, Bawaslu Samarinda menyatakan bahwa MI terbukti melanggar dengan mengampanyekan caleg. Dari keputusan ini, Bawaslu Samarinda merekomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait pelanggaran aturan etik ASN yang

dilakukan MI. Aturan tersebut tertulis dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Daini Rahmat selaku Komisioner Bawaslu Samarinda Divisi Hukum Data dan Informasi mengatakan saat ditemui pada (5/4) lalu mengatakan bahwa ia baru saja kembali dari Jakarta untuk memberikan rekomendasi ke kasus MI ke KASN, tepatnya Selasa (2/4). Bawaslu Samarinda akan menunggu selama satu hingga dua minggu terkait keputusan KASN.

Sama seperti dengan pernyataannya kepada *Sketsa*, kepada Bawaslu MI tetap bersikukuh bahwa acara yang ia hadiri saat itu adalah bimtek. “Tapi kami kan berpegangan pada surat tanda kegiatan yang diurus polisi, di sana tidak dijelaskan kalau itu bimtek, tapi kampanye,” jelasnya.

Berbeda dengan pernyataan MI kepada *Sketsa* yang mengaku tidak mengetahui kepemilikan mobil caleg di FEB, pernyataan lain ia sampaikan kepada Bawaslu. MI mengaku bahwa ia menumpang dengan mobil tersebut. “Ketika saya tanya, dia akui. Cuma dia bilang 'saya cuma menumpang, bukan saya yang nyupir. Dari pada saya jalan kaki, mending saya bermobil',” ujar Daini.

Ia juga tak sependapat dengan MI yang menilai bahwa tindakannya merupakan bentuk dari implementasi tridarma. “Bukan begitu perwujudan tridarma perguruan tinggi dalam hal berkampanye seperti itu. Tridarma perguruan tinggi punya ruang-ruang yang sifatnya ilmiah,” ujarnya.

Terkait MI yang mengaku sejak 2009 sering diundang sebagai pengisi materi bimtek, Daini mengaku memang sering mendengar MI turut serta dalam kontestasi politik. Tetapi saat itu ia belum menjabat di Bawaslu.

Saipul Bahtiar Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) saat ditemui *Sketsa* (28/3) menceritakan asal mula dugaan pelanggaran ini muncul. Saipul membenarkan jika kegiatan

tersebut diawasi oleh pihak Bawaslu. Di sana turut hadir pula panitia pengawas pemilu (Panwaslu) kecamatan Samarinda, yang kemudian melaporkan masalah ini kepada pihak Bawaslu Kaltim.

Berdasarkan bukti foto, video dan juga penglihatan langsung pengawas yang berada di sana, MI dalam acara itu juga terlihat berperan aktif dan terkesan berbicara seperti juru kampanye. Bahkan turut menyuarakan slogan kemenangan. Ditambah lagi, berdasarkan pantauan tim Bawaslu acara tersebut tidak ditemukan penyampaian materi, hanya ikrar saksi.



**Saipul Bahtiar**  
Ketua Bawaslu Kaltim



**Daini Rahmat**  
Komisioner Bawaslu Samarinda

Sedang untuk kasus EI, penyelesaian dilakukan langsung oleh Panwaslu yang berada di kedutaan Malaysia. Panwaslu dengan meminta bantuan kepada Bawaslu RI untuk meminta kepada Bawaslu Kaltim terkait keterangan bahwa yang bersangkutan adalah dosen di Unmul.

Muhammad Jabar, Staf Pendukung Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Kaltim mengatakan pihak-pihak yang boleh terlibat kampanye harus terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU), termasuk timses. Seperti yang diatur dalam KPU terkait kegiatan kampanye, harus mendaftarkan diri untuk menjadi tim kemenangan yang akan menyukseskan dan melaksanakan agenda kampanye calon yang didukung.

"Jadi kalau yang di luar itu tidak diakui. Sekarang kampanye itu harus membuat surat pemberitahuan ke kepolisian, diteruskan ke Bawaslu juga. Kalau tidak ada surat pemberitahuannya itu akan dicoret," jelas Jabar, Selasa (19/3).

Berdasarkan temuan Bawaslu, pelanggaran kampanye yang melibatkan ASN Unmul baru kali ini. Sebelumnya yang sering ditemukan adalah keterlibatan lurah hingga kepala desa. Hal ini kemudian membuat Jabar miris, sebab orang-orang yang paham politik dalam hal ini dosen justru terjerumus dalam lingkaran politik. Ia pun menyarankan agar ASN yang bersangkutan melepaskan jabatannya sebelum benar-benar terjun ke dunia politik.

"Saya pikir lebih baik seperti itu kalau memang ingin melakukan atau menjadi timses. Di aturan dalam undang-undang isinya juga sama, kalau ingin kampanye, jadi timses lepas dulu status ASN-nya," ucap Jabar.

Berbagai cara pun dilakukan untuk mencegah pelanggaran pemilu. Seperti menyebarkan surat edaran, sosialisasi, hingga menjalin kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi. Bawaslu juga dituntut untuk dapat bersikap secara profesional, tidak hanya sebagai pengawas, Bawaslu dan juga KPU juga diawasi dan dipantau kinerjanya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP). Sehingga masyarakat juga bisa memegang kontrol untuk melaporkan jika KPU dan Bawaslu tidak netral.

## Penyelidikan Sisi Pidana MI Dihentikan

Baru-baru ini, Bawaslu Kaltim menyatakan menghentikan tindakan penyelidikan pidana MI. Tak lama setelah Bawaslu Samarinda menyatakan MI melanggar dan terbukti melakukan tindakan kampanye. Dikatakan Saipul hal ini diputuskan lantaran pembahasan di sentra penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu) tidak cukup bukti untuk lanjut ke tahap berikutnya, yakni penyidikan.

"Pada pembahasan di sentra Gakkumdu, disimpulkan belum memenuhi bukti awal permulaan untuk dapat lanjut ke tahap berikutnya," tulisnya melalui WhatsApp.

Selain Bawaslu, Gakkumdu juga terdiri dari polisi dan jaksa. Herdiansyah Hamzah selaku pengamat hukum Unmul mengatakan masing-masing unsur harus dapat mengurai pandangannya agar nampak unsur mana yang tidak konsisten dalam upaya penegakan hukum. Ia juga menambahkan bahwa adanya kelemahan regulasi, di mana ketentuan pidana terhadap ASN hanya dianggap memenuhi unsur jika menjadi pelaksana atau tim kampanye.

"Tapi setidaknya upaya mengusut sisi pidana kasus ini, meski dihentikan oleh Gakkumdu, memberikan pesan kepada semua ASN agar lebih wawas diri untuk tidak terlibat dalam kegiatan kampanye apapun," tandasnya.

● **PENULIS:** WILLIAM MALIKI, FADIAH ADLINA, YULIA CAHYANI PUTRI, HUMAIRA PERMATA  
**EDITOR:** NUR ELISHA

## Aturan dalam Ruang Gerak Politik

Sumber: Pascasarjana Unmul

*Aturan menjadi bentuk dari sebuah konsekuensi untuk memperjelas dan memberikan batasan. Begitu juga dalam politik, ada landasan dan ketentuan yang semestinya dimengerti agar semuanya dapat berjalan bersesuaian.*

**W**arga Indonesia yang menjadi pemilih dalam pemilu bebas dalam menentukan pilihannya. Meski bebas, namun bukan berarti dapat bergerak lepas. Ada aturan dan etika yang harus dijaga demi menjaga muruah politik di Indonesia. Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Aparatur Sipil Negara (ASN), yang merupakan pelayan masyarakat dituntut untuk netral selama masa pemilu ini, demi menyukseskan pemilihan legislatif (pileg) dan juga pemilihan presiden (pilpres).

ASN, TNI dan Polri harus menjunjung netralitas demi menjaga kedamaian berpolitik. Berdasarkan aturan, ruang gerak netralitas TNI diatur dalam UU Nomor 34 tahun 2004. Khususnya dalam pasal 9, disebutkan bahwa prajurit TNI dilarang terlibat dalam politik praktis. Sementara

aturan bagi Polri dicantumkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Melalui pasal 28, disebutkan Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri dalam berkegiatan politik praktis. Sedangkan terkait ASN, dijelaskan dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 2 huruf f, bahwa ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Dosen yang berstatus ASN menjadi yang dekat dengan kampus. Unmul baru-baru ini kembali membawa kabar mengejutkan dengan dugaan keterlibatan ASN-nya dalam kegiatan politik. Dosen dengan inisial MI dan EI menjadi yang santer terdengar dan dikaitkan dengan praktik kampanye. Ketua Program Studi S1 Pemerintahan Integratif (PIN), Budiman turut menanggapi. "Sudah jelas,

mengenai keterlibatan ASN dalam politik di zaman sekarang sudah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu," terangnya.

Secara gamblang, larangan ini tertuang dalam undang-undang tersebut. Dijelaskan pula pihak-pihak mana saja yang dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye politik. Seperti dalam Pasal 280 Ayat 2 huruf f yang menerangkan bahwa seorang ASN sama sekali dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu.

Beredarnya kabar keterlibatan ASN Unmul ini cukup menggemparkan. Sebut saja El yang dalam videonya mengakui bahwa dia adalah seorang ASN di Unmul dan dengan terang-terangan menyatakan dukungannya kepada salah satu paslon yang maju di pilpres. Menurut Budiman hal ini jelas menyalahi aturan yang ada. Karena jika terbukti menggadaikan netralitasnya, ASN tersebut bisa saja dijatuhi sanksi pidana dan sanksi administratif (etik).

"Kalau pidana, jelas hukuman penjara maksimal satu atau dua tahun dan dikenakan denda. Adapun sanksi administratif berupa penundaan kenaikan jabatan, penurunan pangkat, hingga pemberhentian secara tidak hormat," jelasnya.

Sebagai bagian dari civitas academica, mahasiswa juga rawan terlibat dalam kegiatan politik praktis. Terkait hal tersebut Budiman menerangkan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Dia sepakat jika kegiatan politik tidak boleh dilakukan di dalam kampus. Namun Budiman menganggap jika hal tersebut dilakukan di luar kampus oleh mahasiswa, maka sah-sah saja.

"Permasalahannya adalah ketika mahasiswa tersebut membawa salah seorang calon legislatif (caleg) untuk berkampanye di dalam kampus. Kegiatan semacam ini yang tidak boleh," tambahnya.

Budiman menganggap bahwa keterlibatan mahasiswa dalam parpol di luar kampus sebagai fenomena baik. Dia tidak menampik bahwa parpol bisa menjadi wadah untuk membentuk jiwa-jiwa kepemimpinan. Karena Budiman memandang

realitas saat ini sangat krisis jiwa kepemimpinan. Sehingga mereka yang terlibat akan terlatih dan siap menjadi calon-calon pembuat kebijakan baru yang bisa saja lebih baik.

Dikatakan Budiman banyak kejadian yang

pernah  
mengund  
a n g  
M a ' r u f  
A m i n  
m a u p u n  
S a n d i a g a  
U n o  
s e b a g a i  
p e m b i c a r a  
n y a k e  
b e b e r a p a



**Budiman**

Ketua Program Studi

S1 Pemerintahan Integratif Unmul

kampus terutama dalam kegiatan mahasiswa. Hal ini tentu memiliki potensi untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Menurutnya harus bisa dibedakan dua sisi seorang Sandiaga sebagai pengusaha dan sebagai cawapres. Sama halnya dengan Ma'ruf Amin yang merupakan seorang ulama, dan di satu sisi juga seorang cawapres. Perlu kehati-hatian dalam bertindak, karena jika tidak dikawal dengan baik, maka kejadian tadi bisa merusak netralitas kampus itu sendiri.

Politik praktis sejatinya menjadi perhatian saat ini. Seseorang bisa saja tanpa sadar melakukan tindakan-tindakan yang tidak semestinya. Budiman mencontohkan hal ini kerap terjadi di dalam kelas antara dosen dengan mahasiswanya. Dia berkata bahwa kegiatan seperti mengajak, membujuk, atau menyosialisasikan calon tertentu tidak dibenarkan, bahkan merupakan bentuk pelanggaran.

Menanggapi dua ASN yang diduga melakukan politik praktis, Budiman beranggapan bahwa semestinya ASN tersebut paham akan posisinya. Terlebih di era teknologi yang kian cepat dan canggih, sehingga berbagai informasi dan edaran lebih mudah didapatkan. Lebih lanjut, terkait dengan

upaya penanggulangan yang harus ditempuh Unmul, Budiman juga menekankan perlunya sosialisasi secara menyeluruh ke semua kalangan civitas academica. Meliputi dosen, staf atau karyawan, hingga mahasiswa. Karena diharapkan peristiwa-peristiwa serupa tidak terulang kembali di kemudian hari hingga mencoreng ASN dan institusinya. Tentunya penekanan sosialisasi ini guna memahami dan mencerdaskan elemen-elemen kampus agar tidak melebur bersama kegiatan yang tidak semestinya.

Menilik dari kacamata hukum, keterlibatan ASN ataupun mahasiswa pada masa-masa kampanye seperti ini memang cukup rawan. Bukan hanya mencemari independensi kampus, namun juga mencederai integritas organisasi mahasiswa. Herdiansyah Hamzah, pengamat hukum FH Unmul yang akrab disapa Castro ini juga turut menyangkan dugaan keterlibatan ASN dalam perpolitikan. Castro mengungkap bahwa seorang dosen harusnya bisa menjadi seorang teladan, bukan orang yang justru dengan gampang melanggar

aturan.

Castro menjelaskan dalam masa-masa kampanye, sering terjadi kesalahpahaman yang berujung kepada kecurigaan kampanye praktis. Dia mengatakan bahwa dari sudut pandang UU Pemilu, sah saja jika seseorang ingin menunjukkan preferensi politiknya. Namun, yang perlu diperhatikan adalah kehati-hatian dalam menunjukkan kecondongan politiknya. Terlebih bagi para pejabat di kampus atau organisasi mahasiswa, konsekuensinya tidak boleh menampilkan kecondongan berpolitik.

"Memang benar setiap mahasiswa punya hak menunjukkan preferensi politiknya secara terbuka. Tapi mesti dipahami jika dia itu pengurus lembaga yang melekat jabatan secara simbolik. Konsekuensinya, sikap politik tidak boleh ditunjukkan secara terbuka," tutup dosen FH Unmul itu.

● **PENULIS:** SUTI SRI HARDIYANTI, ROSMI RAHMA, NAWWAR HAYYU H, SYAHRANI  
**EDITOR:** WILLIAM MALIKI



**OPEN**  
**PRE ORDER**  
**Rp. 90.000**

Tersedia Warna Kaos:



Cp: 0812 5306 5946 MERU

## Menilik Jejak Politik Praktis Di Unmul

*Kemunculan politik praktis kerap menjadi fenomena menjelang masa pemilihan. Begitu juga dalam momen pemilu kali ini, termasuk di Unmul. Meski kampus sudah seharusnya steril dari segala bentuk tindakan politik praktis.*



Sore itu, terik matahari masih menyengat tatkala *Sketsa* menghampiri sosok perempuan yang tengah duduk di gazebo samping Economic Center (EC), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB). Perempuan itu bernama Winna\*. Ia merupakan mahasiswi FEB yang menjadi relawan untuk salah satu caleg dari partai Golongan Karya (Golkar). Sebagai seorang relawan, ia memiliki beberapa tugas yang harus dilakukan. Salah satunya adalah mengumpulkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang-orang untuk dijadikan sebagai bentuk dukungan dan melihat besarnya pengaruh sang caleg. Namun, ia mengaku pernah meminta NIK di dalam kelas.

“Awalnya saya *chat* teman saya, 'Bisa ketemuan di kos, enggak?' tapi dia bilang 'Ih, enggak bisa, ketemuan di kampus aja ya,'. Jadi akhirnya saya ketemuan dan minta di kelas,” jelasnya. Tidak hanya meminta NIK, Winna turut

memberikan *souvenir* kepada siapapun yang sudah membagikan NIK-nya sebagai ucapan terima kasih. Mereka yang memberikan NIK juga diminta untuk mengisi sebuah formulir. “Cuma mengisi formulir kecil yang berisi dua pertanyaan. Cara jawabnya dicoret gitu, iya atau tidak. Salah satu pertanyaannya, kenal caleg tersebut atau tidak. Terus isi NIK. Sempel aja,” jawabnya.

Winna menyebut, selain dirinya, terdapat empat rekan lainnya yang menjadi relawan. Namun, masing-masing dari mereka telah memiliki target tersendiri, sehingga ia tidak pernah secara langsung melihat kawannya meminta NIK di dalam

kampus. Ketika ditanya lebih lanjut mengenai keterlibatannya sebagai relawan, ia mengaku bahwa dirinya dikenalkan oleh 'orang penting' di FEB untuk ikut menjadi relawan partai. Namun, Winna enggan memberikan pernyataan lebih lanjut mengenai siapa orang tersebut.

“Ya orang penting lah di sini (FEB), terkenal



pokoknya di kalangan maba (mahasiswa baru),” ucapnya.

Winna mengaku yang ia lakukan menjerus praktik politik praktis. Meskipun tidak ada regulasi yang melarang mahasiswa untuk terlibat dalam partai atau menjadi relawan, seperti halnya yang berlaku pada Aparatur Sipil Negara (ASN). Tetapi yang Winna lakukan bertujuan untuk membantu atau telah menguntungkan satu pihak dan juga ia lakukan di dalam ranah kampus. Karena itu, ia memutuskan untuk berhenti menjadi relawan.

“Kalau sekarang saya sudah enggak (ikut), sudah lepas dari relawan. Enggak mengikuti proses lanjutannya,” ujarnya.

Meski imbauan dan aturan sudah jelas digaungkan, nyatanya belum dapat menjamin universitas benar-benar netral. Dosen sebagai tenaga pengajar rupanya masih belum seluruhnya dapat menghindari tindakan politik praktis di dalam kampus. Terlebih di tahun politik ini, semakin meramalkan kontes pemilu. Masih ada pendidik yang menyelipkan pandangan politik pribadinya di hadapan mahasiswa, bahkan dilakukan di dalam ruang kelas. Seperti yang ditemukan Reine\*, salah satu mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP).

Reine mengatakan bahwa ada beberapa dosen yang kerap memberikan opininya terkait mereka yang akan maju di pemilu kali ini. Ia bahkan mengaku sempat mendengarkan langsung dari seorang dosen yang secara terang-terangan menyatakan dukungannya kepada salah satu

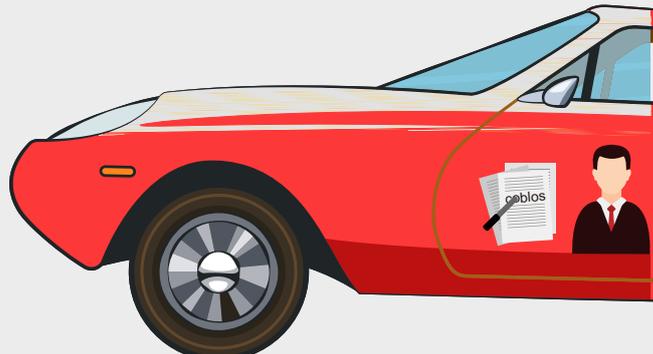
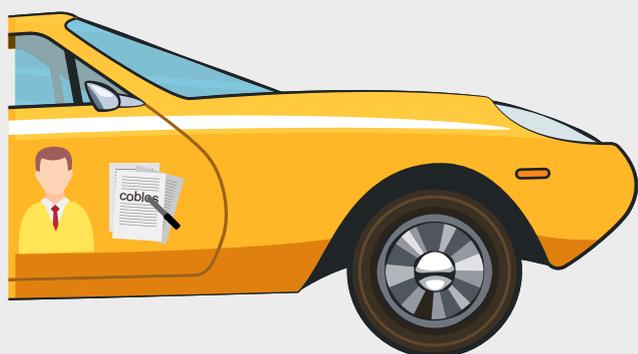
paslon yang akan maju di pemilihan presiden (pilpres) pemilu kali ini. “Ada salah satu dosen di sebuah forum mengatakan secara gamblang, ‘kalau mau Indonesia lebih baik, pilih saja paslon nomor urut dua’”, ujarnya menirukan.

Tahu akan adanya aturan, Reine menyayangkan tindakan beberapa oknum pengajar tersebut. “Menurut saya itu tidak benar. Bahkan diatur dalam undang-undang.”

## Mobil Caleg Jelajahi Kampus

Bukan hanya itu, kampus FEB juga sempat dikejutkan dengan kehadiran mobil bergambar caleg. Salah satunya mobil dari Partai Golongan Karya (Golkar) yang mengusung caleg Rudy Mas'ud terparkir rapi di halaman gedung S2 FEB. Saat itu tak diketahui siapa yang membawa mobil tersebut. Sketsa mencoba mencari tahu kepemilikan mobil tersebut dengan mendatangi kantor sistem administrasi manunggal satu atap (samsat) dengan mengecek pelat mobil tersebut. Namun sayang tidak ditemukan informasi apapun sebab mobil tersebut baru dan belum terdaftar. Belakangan diketahui mobil itu turut ditumpangi MI, salah satu dosen FEB.

Tak berselang lama, pada Sabtu pagi, mobil bergambar caleg dari Partai Gerindra terlihat menyambangi kampus FEB. Mobil tersebut bergambar caleg di daerah pilihan (dapil) Balikpapan, lengkap dengan nomor urut dan namanya, Rahmatia. Berdasarkan penelusuran Sketsa ke Samsat, kepemilikan mobil tersebut



atas nama Rahmawati. Sementara belakangan diketahui Rahmatia merupakan mahasiswi S2 FEB. Namun kepada *Sketsa*, yang bersangkutan tak kunjung memberikan respons.

Fenomena mobil caleg ini juga disoroti oleh Ketua Bawaslu Kaltim Saipul Bahtiar. Dirinya mengaku pernah mendengar hal ini dan melihatnya berupa foto di tempat kejadian. Menurutnya, sangat disayangkan bahwa tidak ada mahasiswa maupun ormawa kampus yang melaporkan kejadian ini kepada pihak Bawaslu sebagai pengawas jalannya pemilihan umum.

“Seharusnya itu dilaporkan, terutama yang menyaksikan atau yang mengambil gambar (foto) pada saat itu, sehingga dapat dijadikan bagian dari alat bukti untuk diperiksa,” ucapnya

“Memang disayangkan sekali mahasiswa tidak terlalu kritis dengan adanya itu, justru sebenarnya mahasiswa seharusnya proaktif dan memanggil Bawaslu, dalam mengawasi mereka yang tidak dapat kami jangkau pada saat itu. Misalnya ada yang melaporkan, itu lebih kuat lagi (penanganannya),” tambahnya.

Dirinya menuturkan, meskipun mobil-mobil caleg tersebut bukan merupakan atribut kampanye, namun secara tidak langsung tetap dianggap aktivitas untuk menyosialisasikan diri sendiri.

“Foto itu kan mirip dengan alat-alat peraga atau kampanye. Meskipun bukan alat kampanye, tapi mirip atau ada kemiripan dengan alat peraga kampanye. Jadi itu juga salah satu bentuk yang bisa

di kategorikan menyosialisasikan diri. Ada foto, ada nomor urut, ada juga dapilnya, juga calon anggota legislatif darimana. Itu adalah bentuk dari mengkampanyekan diri yang bersangkutan,” tuturnya.

Hal ini membuktikan bahwa kesadaran masyarakat kampus akan praktik politik praktis masih begitu kurang. Ini ditandai pula dengan tidak adanya sanksi tegas atau pemeriksaan lebih lanjut dari pihak fakultas terkait peristiwa mobil caleg ini. Hingga kini, Dekan FEB Syarifah Hidayah tidak dapat ditemui untuk dimintai konfirmasi.

## Langkah Advokasi

Mengetahui adanya mobil bergambar caleg di lingkungan fakultasnya yang terjadi tak hanya sekali, BEM FEB mengambil langkah untuk memberi teguran. Ditemui *Sketsa*, Mohammad Reza Munandar Gubernur BEM FEB menyampaikan bahwa ia dan rekan-rekannya mengambil tindakan dengan gertakan ala mahasiswa. “Kami menempelkan semacam poster (di mobil) dengan tulisan 'kalau mau kampanye jangan di sini, di sini tempatnya berdebat bukan kampanye'. Artinya sikap teman-teman BEM FEB sudah jelas menolak keras adanya politik praktis yang terjadi di kampus kami,” jelasnya. Tidak hanya itu, pihaknya juga sebelumnya telah mendiskusikannya dengan Aliansi Garuda Mulawarman sebelum akhirnya membuat deklarasi menolak politik praktis.

“Untuk deklarasinya kita eskalasinya skala



Ilustrasi: Yusuf Nikhita, Freepik

universitas karena ini menyangkut citra baik Unmul,” jelasnya.

Reza juga menuturkan adanya caleg yang memberi beasiswa kepada mahasiswa. Namun selain itu, mahasiswa yang menerima beasiswa tersebut ditawarkan untuk menjadi relawan dari caleg tersebut. Ia merasa miris, sebab menurutnya beasiswa adalah tunjangan pendidikan, kini justru digunakan untuk mengikat relawan.

“Kemarin ada beberapa (teman) yang masuk (sebagai relawan) adalah penerima beasiswa, kader BEM maupun mahasiswa FEB, itu beasiswanya berasal dari salah satu paslon DPR RI,” jelasnya. “Sampai sana memang ada penawaran untuk mau ikut tim relawan atau tidak. Tapi kalau kader BEM FEB sendiri saya bisa pastikan mereka tidak terlibat menjadi relawan, hanya sebagai penerima beasiswa saja,” terangnya.

Netralitas kampus dalam masa pemilu ini tentunya dapat terwujud jika disadari oleh setiap lapis civitas academica. Namun faktanya, Unmul masih belum sepenuhnya bisa memenuhi itu di pemilu kali ini. Tidak ada yang salah dengan politik, tidak ada juga yang mengekang seseorang agar tidak melakukan tindakan politik apapun. Hanya saja, semua dapat berjalan teratur jika mengikuti alur yang telah diatur. Sebagai universitas yang berintegritas, Unmul masih perlu kerja keras dan kerja sama untuk menjaga muruah kampus agar tetap terjaga.

\* NAMA YANG DIGUNAKAN ADALAH SAMARAN

• PENULIS: CHRISTNINA MAHARANI, EKA RIZKI PRABOWO, ARIANI MAYA TINAMBUNAN, MUHAMMAD KHUSAIRI, RESTU ALMALITA  
EDITOR: FADIAH ADLINA

## Kamis Kamus

Piyama

Piama

/pi.a.ma/

Pakaian yang biasanya digunakan di rumah atau untuk tidur

Jogging

Joging

/jo.ging/

Berlari pelan (antara lari dan berjalan) untuk kesehatan

HADIR  
SETIAP  
KAMIS



## Mahasiswa dan Isu Jemari Politik

*Bicara soal aturan, kampus sudah seharusnya menjadi tempat yang bersih dari isu-isu perpolitikan. Namun rupanya euforia politik melekat tak mengenal tempat. Kepada berbagai elemen kampus, hal ini belum sepenuhnya terhindarkan. Tahun ini menjadi bukti bahwa politik di dalam kampus masih dapat ditemukan. Ada yang nyata, ada juga yang secara tak kasat mata. Mahasiswa tak lepas menjadi sasaran mereka yang hendak berpesta.*

Atmosfer politik mendekati pesta demokrasi panas. Semua berusaha meraih perhatian untuk kemudian menjadi terpilih. Saling unjuk gigi, paparkan janji, semua dilakukan tak lain untuk menggaet banyak atensi. Sibuk menarik perhatian masyarakat bukan hanya menjadi tugas mereka yang maju, tapi juga dari mereka yang mendukung di belakangnya. Berusaha memperbesar lingkaran tim sukses. Generasi milenial dinilai menjadi salah satu basis massa yang cukup kuat. Terlebih peran generasi muda agar terlibat dalam politik bangsa akhir-akhir ini menjadi ramai digaugkan.

Sejatinya mahasiswa memiliki dua peranan yang berbeda. Sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Kampus harus menjadi zona yang netral dan terhindar dari indikasi keterlibatan civitas academica dalam politik. Termasuk mahasiswa, yang tidak diperkenankan untuk menjalankan perannya di balik bayang-bayang kepentingan politik. Tetapi di luar kampus, mahasiswa merupakan individual yang bebas, yang dapat menentukan sendiri sikap dan juga pilihannya. Namun hasrat untuk melibatkan

mereka yang berstatus mahasiswa ternyata masih tetap ada. Mengundang mereka untuk bergabung menyukseskan yang didukung. Hal ini terjadi pada salah satu unit kegiatan mahasiswa (UKM) Unmul, Keluarga Mahasiswa Bidik Misi (Gamadiksi).

Zainul Afri, Ketua Gamadiksi 2019 mengaku UKM yang dipimpinnya saat ini sempat mendapatkan tawaran untuk terlibat sebagai tim sukses (timses) demi mendukung salah satu calon legislatif (caleg) yang kini juga masih menjabat di kursi DPR. Niat memininang Gamadiksi untuk bergabung menjadi tim sukses tidak datang begitu saja. Dikatakan Zainul, akhir tahun lalu tepatnya pada 15 September 2018, terjalin kerja sama antara caleg tersebut dengan Gamadiksi dalam kegiatan seminar Gamadiksi, yakni Samba (Sambut Mahasiswa Bidik Misi). Dalam seminar yang bertujuan untuk mengenalkan bidik misi tersebut, caleg itu diundang sebagai pemateri.

Usai memberikan materi, sang caleg memberikan timbal balik berupa *merchandise*. Di antaranya adalah buku, dan tas kecil. Dari seluruh



**Zainul Afri**  
(Ketua Gamadiksi 2019)

antaranya adalah buku, dan tas kecil. Dari seluruh jenis barang yang diberikan, terdapat nama dan foto dirinya. Selain itu, jumlah *merchandise* yang dibagi juga cukup banyak, sehingga masih tersisa meski sudah

dibagikan kepada seluruh peserta seminar. Barang tersebut lantas dibagikan untuk internal Gamadiksi. Adanya bagi-bagi *merchandise* ini dikatakan Zainul tidak masalah, karena saat itu belum memasuki masa kampanye.

“Menurut kami, itu tidak masalah karena belum masa kampanye. Dan kami memang tidak ada menyinggung masalah tersebut. Itu juga sebenarnya keputusan badan pengurus harian terdahulu,” terangnya.

Di kepengurusan Gamadiksi yang baru, dengan Zainul sebagai ketua, Badan Pengurus Harian (BPH) Gamadiksi diundang oleh timses caleg untuk bertemu. Mulanya, Zainul tidak tahu apa pembahasan yang akan dibicarakan dalam pertemuan tersebut, yang jelas ia bersama rekannya memenuhi undangan. “Sekitar Februari 2019 kami diundang untuk bertemu dengan tim suksesnya. Perihal mempertimbangkan apakah Gamadiksi masih mau diajak kerja sama atau tidak. Di sana mereka mengajak kami untuk ikut menjadi tim sukses,” ungkapnya.

Setelah pertemuan dengan timses tersebut, BPH Gamadiksi membicarakannya dengan Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) dan juga alumni. Dari hasil pembicaraan tersebut, dikatakan Zainul, MPO dan alumni Gamadiksi menegaskan kembali bahwa Gamadiksi tidak dapat dipengaruhi partai atau caleg manapun. Sehingga diputuskan untuk menolak ajakan tersebut, mengingat hal tersebut terlalu berat dan dampaknya dapat dilihat dari

eksternal dan internal.

“Otomatis kami terikat dengan prinsip yang ada. Kami menolak ajakan dari tim sukses beliau ini dengan dalih kami tidak bergerak di partai politik, tapi kami bergerak di bidang mahasiswa bidik misi,” ujarnya.

Bicara soal *merchandise* yang masih tersisa, beberapa di antaranya dibagikan kepada internal Gamadiksi. Dikatakan Zainul, sejumlah barang pemberian barang yang kini masih tersimpan di sekretariat Gamadiksi merupakan bentuk ucapan terima kasihnya sebagai pemateri. Di kepengurusan yang baru ini, belum ada lagi pembicaraan untuk melanjutkan kerja sama dengan caleg tersebut. “Karena kami juga belum tahu bagaimana alur kerja samanya kami tidak menjalankan dan tidak meneruskan,” tutup Zainul.

## **Mereka yang Kerap Dikaitkan**

Berbeda dengan Gamadiksi yang dengan terbuka menyatakan sempat diajak untuk menjadi timses, ada juga UKM lainnya yang dinilai publik memiliki keterkaitan dengan partai atau kepentingan politik. Salah satunya adalah Pusat Studi Islam Mahasiswa (Pusdima). UKM yang telah berdiri sejak 1984 ini kerap disandingkan dengan salah satu partai politik yang juga berbasis agama, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Muhammad Dicky Rahman selaku Ketua Pusdima Unmul tak menampik adanya dugaan yang berembus. Ia menilai ada faktor yang menjadi alasan Pusdima disebut-sebut berkaitan dengan salah satu partai politik.

“Faktor kuatnya karena beberapa alumni pernah menjabat posisi strategis di Pusdima, seperti ketua umum atau BPH Pusdima. Kemudian mereka masuk di salah satu partai politik, ya katakanlah sebagai tokoh-tokoh kunci juga. Makanya pandangan publik melihat bahwasannya alumni, lulusan bahkan Pusdima-nya pun itu terkait dengan partai politik tersebut,” bebarnya.

Dicky menjelaskan bahwa Pusdima merupakan murni organisasi yang ada di bawah naungan Unmul dan memiliki jalur yang berbeda dengan partai politik. Terkait beberapa alumni yang memang akhirnya menjadi tokoh-tokoh partai politik, itu merupakan hak pribadi mereka. Ia juga mengatakan tidak semua alumninya terlibat di partai tersebut, bahkan ada juga yang memilih tidak terjun di dunia politik. Terlebih, Pusdima merupakan salah satu UKM yang cukup senior di Unmul dan hingga kini telah mencetak alumni yang tersebar di berbagai daerah.

Bicara soal keterlibatan anggota, Dicky mengatakan Pusdima tidak memiliki aturan yang mengikat untuk mengatur anggotanya jika ingin terlibat sebagai relawan salah satu partai. Ia juga belum mendengar jika ada anggotanya yang tergabung sebagai relawan politik, namun dapat dipastikannya BPH Pusdima tidak ada yang terlibat. “Cuma memang kode etiknya sebagai mahasiswa, teman-teman paham jugalah seharusnya kita tidak terlibat dengan hal-hal tersebut,” ujarnya.



**Muhammad Dicky Rahman**  
(Ketua Pusdima Unmul)

Sering mendengar adanya dugaan Pusdima digawangi salah satu partai politik, Dicky mengaku ia bersama rekan-rekannya merasa risih. “Kalau dari kami ya risih pastinya. Namun tiap orang berhak beropini dan berpendapat, dan kami tidak bisa membatasi.”

Bukan hanya Pusdima, Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) turut serta dikaitkan dengan kepentingan partai politik. Meskipun BEM KM menjadi organisasi besar di kampus, bukan berarti lepas dari dugaan adanya keberpihakan dengan partai politik. Febri Abdul Haminudin selaku Presiden BEM KM menilai adanya

pendapat itu adalah hak setiap orang. “Hingga hari ini tidak ada bukti kalau memang BEM KM ini berkaitan dengan parpol (partai politik). Enggak pernah ada yang membuktikan, hanya opini belaka,” ujarnya.

Ia menegaskan, jika dugaan ini dikaitkan dengan pendahulu BEM KM. Sedangkan status mereka saat ini bukan lagi sebagai mahasiswa atau pemegang jabatan di lembaga. “Kalau mereka berpolitik ke mana-mana ya, kita enggak bisa melarang. Itu kan pilihan mereka. Beda kalau untuk lembaga. Kita tegaskan bahwa kita sebagai BEM KM tidak berpolitik. Kalau politik, lebih ke politik pencerdasan,” ujarnya.

Febri juga menegaskan bahwa jalinan alumni dengan BEM KM akan profesional. “Ketika mereka diundang, mereka datang membawa identitasnya (partai) gitu tidak pernah. Tentu mereka sadar kalau itu salah kalau dibawa untuk mahasiswa,” terangnya.

## Membuka Jawaban Partai

Adanya isu yang mengaitkan antara UKM Pusdima dan BEM KM terhadap PKS dikatakan Abdul Rohim memang sudah lama terdengar. Ketua Bidang Hubungan Masyarakat Dewan Perwakilan Wilayah PKS ini mengatakan secara aspek yuridis Pusdima adalah institusi yang masuk kategori UKM yang SK-nya langsung ditandatangani oleh rektor. “Itu sudah cukup jadi bantahan adanya hubungan gelap antara Pusdima dengan PKS,” jelasnya.

Rohim yang merupakan lulusan Fakultas Pertanian (Faperta) Unmul dan alumni Pusdima ini mengatakan tidak ada kewajiban alumni Pusdima menjadi pengurus partai. Selain itu kanalisasi politik jebolan Pusdima tidak hanya di PKS, namun juga tersebar ke partai lainnya. Bahkan ke partai yang



**Febri Abdul Haminudin**  
(Presiden BEM KM Unmul 2019)

bukan berbasis agama. Meski diakuinya karakter kader Pusdima memiliki kemiripan dengan politisi yang ada di PKS, dan menjadi salah satu faktor penyebab berkembangnya opini tersebut.

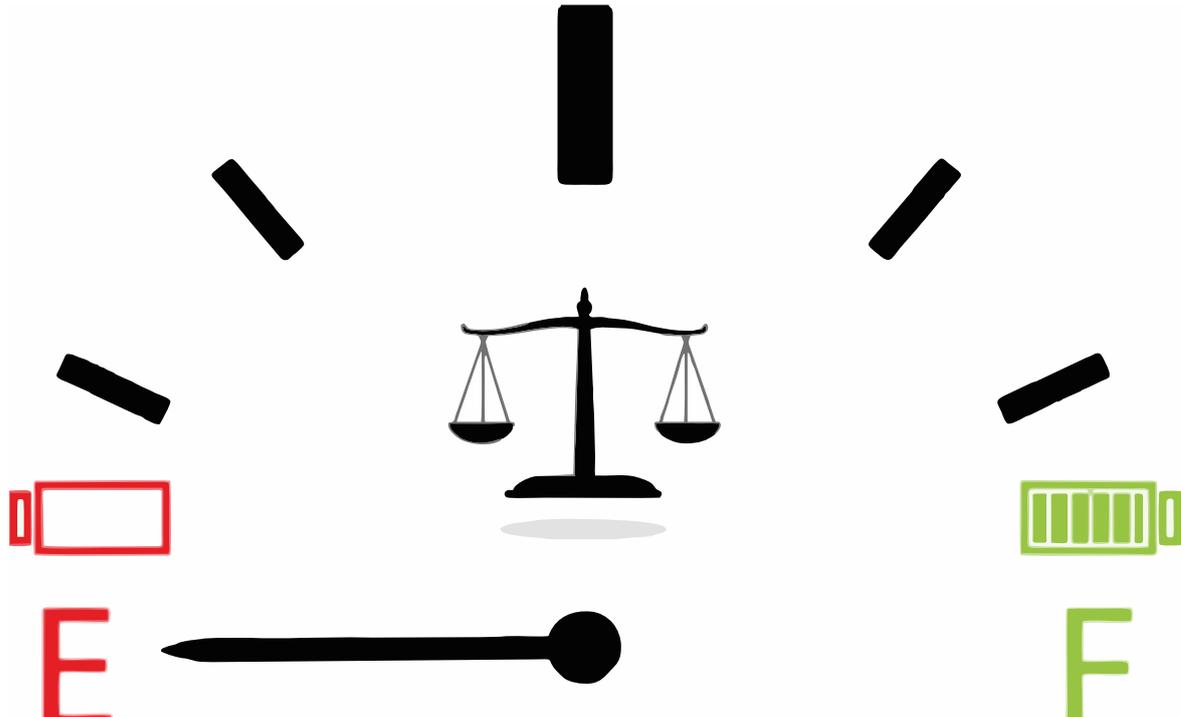
Berlabel partai dakwah, dikatakan Rohim salah satu peran PKS adalah memberikan edukasi/tarbiah (mendidik umat). Melalui jalur ini, PKS masuk ke lapisan generasi muda untuk mengedukasi cara berpikir, merasa dan berperilaku. Tidak menutup kemungkinan, melalui jalur inilah alumni atau anggota aktif Pusdima masuk dalam arus edukasinya PKS. “Saya sudah menjadi simpatisan sejak mahasiswa, karena merasa ada kedekatan dengan PKS dengan sentuhan edukasi itu. PKS kemudian menjadi opsi karena menyajikan menu-menu yang jadi kebutuhan mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat,” terangnya.

Ia juga menyebut bahwa tidak ada salahnya mahasiswa menjadi anggota atau bahkan kader puncak dari sebuah partai, yang terpenting adalah dapat merefleksikan posisi *learning*-nya. Namun sejauh ini dikatakannya mahasiswa yang bergabung

menjadi bagian PKS biasanya tidak diposisikan sebagai pengurus inti. Menjadi anggota refleksinya bermacam-macam, ada yang terlibat dalam aktivitas edukasinya atau aksi kemanusiaan.

Jejak pengalaman organisasi Rohim tidak hanya di Pusdima, ia juga merupakan Presiden BEM KM 2004. Menurutnya, opini yang berkembang lahir dari pengamatan orang-orang sekitar. Sebagai yang berpengalaman di bidang organisasi, ia mengatakan bahwa BEM KM biasanya menjadi tempat pertarungan politik beberapa ideologi dari gerakan mahasiswa. Menurutnya pertarungan politik untuk mendapatkan jabatan presiden dan wakil presiden beberapa tahun belakangan sering dimenangkan oleh kader-kader yang dididik oleh Pusdima. “Karena Pusdima sering dikaitkan dengan PKS, maka yang masuk BEM KM juga mendapatkan stigma yang sama.”

● **PENULIS:** FADIAH ADLINA, SITI ISTAQUL, DIYAH, RESTU ALMALITA  
**EDITOR:** NUR ELISHA



## **E** KRISIS NETRALITAS, **INDEPENDENSI** **F** GOYAH?

• ILLUSTRASI : Lajij Ferren Novelin, Freepik

*Kampanye seolah-olah menjadi ajang perlombaan merebut simpati. Berbagai cara dilakukan demi meraih banyak atensi. Mulai dari yang terang-terangan, hingga yang tersembunyi. Tak sedikit sampai menuai kontroversi.*

**B**erbagai parpol gencar menarik kader dengan menghadirkan wajah-wajah baru untuk diajukan sebagai caleg di pemilu. Jika beberapa tahun belakangan caleg dengan latar belakang selebritas menjadi tren, tahun ini nampaknya tren tersebut mulai berganti. Kaum akademisi menjadi pilihan yang menggiurkan, seperti yang dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dilansir dari *BBC News Indonesia*, Sumardy, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (BPU) PSI, mengatakan bahwa alasan pemilihan akademisi sebagai caleg adalah karena mereka dinilai mempunyai kemampuan intelektual yang teruji, sebab memiliki latar belakang pendidikan formal

yang baik. Sehingga dinilai mampu menawarkan solusi atas persoalan masyarakat.

PSI bahkan menyatakan bahwa partainya memang secara khusus menjaring dosen-dosen muda yang berasal dari beberapa kampus swasta, seperti Universitas Trisakti, Universitas Surya dan Universitas Muhammadiyah. Selain itu, partai senior lainnya seperti Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga menjaring akademisi sebagai bakal caleg mereka.

Kaum akademisi khususnya yang berstatus ASN, memiliki batas dengan urusan politik seperti yang diatur dalam UU. Soal mereka yang kemudian meneruskan rekam jejak di bidang politik menjadi hak individu. Namun faktanya, beberapa oknum ASN berada di garis abu-abu, menyelipkan tindak tanduk politik dai balik statusnya sebagai ASN. Berdasarkan rekapitulasi data penanganan pelanggaran pemilu 2019 Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, terkait netralitas ASN menyentuh *hingga 40*

kasus. Data ini didapat dari laporan dan temuan sejak Januari hingga pertengahan Maret ini.

Agustus 2008 lalu, keterlibatan akademisi kampus di ranah politik sempat heboh dengan terungkapnya kasus Herry Kereh, tenaga pengajar di Universitas Sam Ratulangi yang merangkap jabatan sebagai anggota DPRD Sulut dari partai Golkar. Hal ini bahkan terungkap setelah lima tahun sejak ia menjadi pengurus parpol. Dilansir dari *kompas.com*, Rektor Unsrat menyebut terungkapnya 30 dosen dari berbagai fakultas di Unsrat maju sebagai anggota caleg dan pengurus sejumlah parpol.

Bukan hanya itu, dalam pilkada di Makassar tahun lalu, tiga ASN dari Universitas Hasanuddin diperiksa akibat dugaan melakukan tindakan politik praktis. Ketiganya diketahui secara terang-terangan menggunakan atribut salah satu kandidat kemudian mengunggahnya di media sosial.

Tren ini tentu merisaukan, pasalnya selain tercantum jelas dalam UU, Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (Kemristekdikti) telah menegaskan bahwa kampus harus bersih dari politisasi. Menristekdikti, Mohammad Nasir, bahkan mengancam akan memberikan sanksi jika ada kampus yang terbukti terlibat politik praktis. Larangan ini tertuang dalam UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Tidak hanya melarang politik di ranah kampus seperti yang tertuang dalam Pasal 280 ayat (1), UU ini juga melarang ASN ikut serta dalam kegiatan kampanye untuk calon yang maju di pemilu.

Akademisi kampus seperti dosen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap mahasiswa. Tak sedikit yang menganggap dosen sebagai orang yang lebih banyak tahu ketimbang mahasiswa. Sehingga tak salah jika dosen disebut memiliki peranan penting dalam membantu pemikiran mahasiswa dalam lingkungan kampus. Beberapa kampus akhirnya memberikan perhatian khusus.

Universitas Indonesia (UI) misalnya, mereka menegaskan bahwa akan bersikap netral. Melalui Kepala Humasnya, Rifelly Dewi Astuti, UI menyatakan bahwa mereka telah mengeluarkan imbauan kepada seluruh warga kampus mulai dosen hingga mahasiswa agar menjaga lingkungan kampus dari politik praktis.

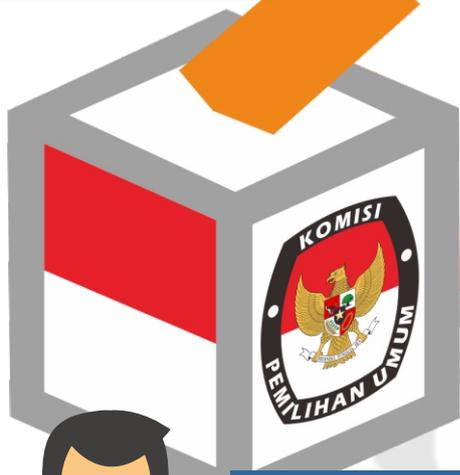
## Bagaimana dengan Unmul?

Sementara itu, ditemui di sekretariat BEM KM, Presiden BEM KM Unmul Febri Abdul Haminudin, mendapati aduan dosen lain selain MI dan EI yang melakukan kegiatan politik. “Ada beberapa dosen lain yang berkampanye di kelas. Ini akan kita usut, sejauh ini masih 'katanya', belum tahu ini benar atau enggak. Belum tahu dosen dari fakultas mana. Parahnya, kabarnya dosen itu terang-terangan kampanyenya akan mendukung salah satu calon,” jelasnya.

Febri mengaku tidak memperlakukan jika akademisi mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai caleg. Selama ia bukan ASN dan berkampanye di tempat yang tepat, maka itu bukanlah sebuah dosa. Akademisi justru dianggap lebih aman dipilih, karena jelas latar belakang keilmuannya. Febri menilai, akademisi justru bisa menggunakan ilmu yang dimiliki untuk mengabdikan dimasyarakat.

Ia pun berharap agar dosen mengerti posisi berkampanye yang benar, jangan sampai wilayah pendidikan dijadikan lahan. “Itu justru mencoreng muka pendidikan kita. Dosen yang dianggap memiliki kapasitas intelektual tinggi justru melanggar aturan yang harusnya ia tahu. Institusi pendidikan itu hakikatnya harus independen. Boleh ikut campur dalam politik, tapi kita tidak kanan-kiri, kita harus berdiri sendiri sebagai pilar yang mengawasi,” tandasnya.

● PENULIS: FERNANDA FADHILA  
EDITOR: FADIAH ADLINA



## JENIS-JENIS PELANGGARAN PEMILU



### Pelanggaran Administrasi

Diterima s.d DIPUTUS oleh Bawaslu/Bawaslu Prov/Bawaslu Kab-Kota kemudian tindak lanjut ke KPU



### Pelanggaran Pidana

Tindak lanjut ke kepolisian-kejaksaan dalam sentra Gakkumdu DIPUTUS oleh lembaga peradilan



### Pelanggaran Kode Etik PP

Bawaslu Provinsi dapat menerima laporan dan diteruskan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI (DKPP)



### Pelanggaran UU yang Bukan Pemilu

Tindak lanjut ke instansi lainnya



## Mengabahkan Peran Mahasiswa dalam Pemilu

*Kampus dituntut menjadi institusi pendidikan yang netral dan bersih dari praktik politik, namun bukan berarti lepas kesertaannya dalam mengawal isu-isu politik. Salah satunya melalui kegiatan yang dilakukan oleh organisasi mahasiswa.*

Lebih dari sekadar status yang disandang, mahasiswa memiliki berbagai peranan, salah satunya sebagai kontrol sosial. Organisasi mahasiswa memiliki peran yang strategis untuk dapat membangun kesadaran mahasiswa terhadap berbagai isu, salah satunya pemilu. Terlebih dalam menyambut pesta demokrasi terbesar yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) merupakan ujung tombak pergerakan mahasiswa di kampus dan memiliki tugas untuk menciptakan itu. Perlunya wadah untuk mencerdaskan mahasiswa terhadap perkembangan politik serta advokasi pemilu di tahun ini, BEM KM merangkumnya dalam program SIAP (Simpul Advokasi Pemilu). Program yang turut melibatkan seluruh fakultas ini diisi dengan kegiatan nonton bareng (nobar) debat kandidat capres dan cawapres.

SIAP juga mengadvokasi mahasiswa yang tidak berdomisili di Samarinda untuk dapat tetap menggunakan hak suaranya dengan menggunakan formulir A-5. Tercatat sebanyak 418 mahasiswa dibantu dalam mengurus formulir A5 melalui SIAP, agar nantinya tetap dapat meramaikan pemilu dengan memilih di Samarinda. Prosesnya dimulai dengan mahasiswa datang dengan mengumpulkan berkas di Gedung MPK dan kemudian diserahkan ke KPU Samarinda.

Selain SIAP, BEM KM juga mengadakan

deklarasi dengan mengajak pihak birokrat kampus. “Kampus ini independen, bagaimana caranya supaya tidak tersusupi dengan kampanye-kampanye terselubung,” terang mahasiswa FKIP ini. Ia juga berharap agar mahasiswa Unmul menggunakan hak pilihnya alias tidak memilih menjadi golongan putih (golput). Karena berdasarkan diskusi Febri dengan KPU, Kaltim memiliki angka golput yang cukup tinggi dengan penyumbang terbesar adalah mahasiswa. Tahun lalu saja dalam pemilihan gubernur, Kaltim hanya diikuti sebesar 50,2% pemilih.

Ia juga menyarankan untuk menggali lebih dalam informasi terkait calon pemilu 2019 ini. Bagi Febri, calon-calon pemimpin tidak semuanya kotor, masih ada yang benar-benar peduli dan semestinya didukung.

Meski masih cukup banyak menyumbang angka golput, Febri menilai sejauh ini mahasiswa khususnya di Unmul cukup mengikuti perkembangan isu politik yang terjadi. Namun belum banyak yang memiliki keinginan untuk terjun langsung ke lapangan. “Dalam aspek memahami, mungkin sudah. Karena sekarang zamannya sosial media. Tetapi untuk kemauan untuk ikut terjun ke lapangan, menurut saya kurang. Ibarat tahu lebih dalam, mungkin kurang untuk mahasiswa sekarang,” tuturnya.

Sementara itu, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) sebagai fakultas yang berlabelkan

Politik, juga menjadi salah satu fakultas yang turut berpartisipasi dalam membangun kesadaran mahasiswa di sana untuk ikut serta mengawal tahun politik. Menurut Dandi Anggoro Aji BEM FISIP 2019, mahasiswa FISIP cukup peka terhadap tahun politik, khususnya bagi mereka yang berorganisasi. “Saya rasa mayoritas peka, yang tidak peka itu ya mereka yang berkuliah hanya untuk mendapatkan ijazah, terus kerja,” ujarnya.

Langkah BEM FISIP untuk meningkatkan minat mahasiswa agar menaruh perhatian pada isu politik dilakukan melalui media sosial dan juga program kerja BEM FISIP, yakni Rumah Politik Mahasiswa (RPM). RPM merupakan salah satu program yang bertujuan untuk mendorong kesadaran mahasiswa dalam mengenal dunia politik, serta belajar mengadvokasi mahasiswa dan masyarakat melalui terjun langsung dengan tinggal di desa.

Selain itu, upaya lain ialah dengan nobar debat kandidat capres dan cawapres dan diskusi. Melalui diskusi inilah peserta yang hadir dapat saling bertukar pendapat dan mengkritisi. “Kita membuka ruang untuk bertanya. Agar sama-sama

mengetahui *track record* dan plus minus-nya. Semua kembali ke pilihan masing-masing, karena beberapa orang juga ada yang memakai prinsip pilih yang terbaik di antara yang terburuk. Cuma dalam nobar diskusi, pertukaran informasi itu penting,” ujarnya.

Berbeda dengan Febri, menurutnya, tiap pemilih dalam hal ini mahasiswa memiliki caranya sendiri dalam menentukan sikap politik, salah satunya dengan memilih untuk golput. Dikatakannya pilihan ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap pemimpin negara. “Menurutku itu sebenarnya enggak masalah karena itu salah satu bentuk ekspresi kekecewaan terhadap sistem terhadap pemerintah,” kata mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2016 ini.

Ia bahkan mengakui jika dirinya termasuk yang merasa kecewa dengan mereka yang akan maju di pemilu setelah mencari tahu *track record* dan latar belakangnya. Tetapi ia tetap menggunakan hak suaranya agar tidak terjadi kecurangan manipulasi suara menggunakan kertas pemilih yang tidak digunakan.

● **PENULIS:** SHAFIRA PANDU WINATA, RATIH PUSPA AYUDIA,  
LAJ FERREN NOVELIN, YUSUF NIKHITA  
**EDITOR:** FADIAH ADLINA





## Peran Relawan Demokrasi Demi Tingkatkan Partisipasi

*Relawan Demokrasi, menjadi perpanjangan tangan KPU.*

*Menyasar ke berbagai elemen, bertujuan untuk menularkan semangat demokrasi.*

**M**embangun kesadaran dan kepekaan berpolitik bukan hanya tugas lembaga penyelenggara atau pengawas pemilu, namun merupakan tanggung jawab bersama. Seperti Relawan Demokrasi, bentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertugas menyosialisasikan kepada masyarakat luas tentang informasi pemilu, mendidik pemilih agar menggunakan haknya dengan bijak, hingga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi. Ini juga bertujuan untuk mengurangi angka golput.

Relawan demokrasi telah terbentuk di beberapa kota/kabupaten di seluruh Indonesia dengan serangkaian seleksi yang cukup ketat, begitu pula di Samarinda. Seleksi yang diadakan sejak bulan Januari ini diikuti dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk mahasiswa. Relawan Demokrasi terdiri dari 10 basis. Di antaranya adalah pemilih keluarga, pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan,

pemilih penyandang disabilitas, pemilih berkebutuhan khusus, pemilih marjinal, komunitas, keagamaan, dan warga internet (warganet). Semuanya berjalan sesuai dengan peran, serta tugas, pokok, dan fungsinya (tupoksi) masing-masing.

Salah satu mahasiswa yang tergabung menjadi relawan ialah Freijae Rakasiwi dan Dalilah Afifah. Pije—sapaan akrab Freijae—membeberkan asal mula keinginannya untuk terlibat sebagai Relawan Demokrasi. Dimulai ketika ia melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2017 lalu. Saat itu ia berkesempatan untuk mengawal pemilihan gubernur (pilgub) di KPU. Mulai dari keterlibatannya di sana, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) ini merasa tertantang, dan membulatkan tekad menjadi Relawan Demokrasi untuk pemilu 2019.

Basis yang dipegang Pije adalah warganet, sementara Dhea pemilih pemula. Keduanya menjadi ketua di basis masing-masing. “Jadi kami berperan

mengisi ruang-ruang di media sosial (medsos). Mulai dari membuat sosialisasi yang disebarluaskan melalui medsos hingga ikut langsung dalam kegiatan sosialisasi,” ujar Pije.

Salah satu contoh sosialisasi yang telah dilaksanakan adalah tentang hoaks yang juga berdampak pada penyelenggaraan pemilu. Kegiatan lainnya adalah sosialisasi tentang mengolah gadget untuk bisa memilah informasi. Selain itu juga membuat konten kreatif yang bertujuan mengedukasi masyarakat mengenai pemilu.

Sementara Dhea yang memegang basis pemilih pemula menasar siswa SMA dan sederajat. Sebab di usia mereka baru membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan diperkenalkan lebih jauh seputar pemilu. Dimulai dengan sosialisasi hingga simulasi mengenai tata cara memilih, dan telah dilakukan di beberapa sekolah di Samarinda, di antaranya MAN1, SMAN 3, dan SMAN 5.

## Suka Duka Menjadi Relawan

Meski Relawan Demokrasi merupakan bentukan dari lembaga yang besar, bukan berarti lepas begitu saja dari kendala dalam pelaksanaannya. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh basis pemilih warganet adalah partisipasi yang tinggi pada pilpres, namun minim untuk pileg. Sementara kendala yang dialami oleh basis pemilih pemula sempat menerima penolakan dari sekolah. “Saya mengoordinir anggota dan bilang, datang dulu ke sekolah-sekolah tersebut, tanyakan mau atau tidak, lalu dibikinkan surat. Sedangkan sekolah maunya surat dulu, jadi kami bingung untuk membuat surat dengan menentukan tanggal. Karena kami semua kuliah, itu yang menjadi kendala utama” terangnya.

Kendala lainnya yang cukup dialami banyak Relawan Demokrasi adalah pembagian waktu. Pije menuturkan, lima anggotanya berasal dari latar belakang profesi yang berbeda-beda. Sehingga harus



saling menyesuaikan. Sementara Dhea, meski tiga belas anggotanya mahasiswa semua, namun ini juga menjadi kendala dalam menyocokkan jadwal satu sama lain

Di balik itu semua, keuntungan yang dirasakan Pije dengan menjadi Relawan Demokrasi ialah memiliki jaringan relasi yang lebih luas, dan juga dapat lebih mengenal masyarakat. Sebab dengan menjadi bagian dari relawan ini, mereka dituntut untuk terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat. Untuk Dhea, sejak ia menjadi Relawan Demokrasi, ia jadi lebih memahami makna relawan, di mana mereka harus mendoktrin diri sendiri atas dasar suka rela.

● PENULIS: MAHAMERU PRIMANTORO PUTERA TIYA ILAHI,  
BRIANDENA SILVANIA, ANANDA PUTRI AISYAH  
EDITOR: FADIAHADLINA



## Menengok Unmul dalam Sejarah Kaidah ASN

Ilustrasi: Freepik

*Pesta demokrasi sudah di depan mata. Berbagai cara dilakukan peserta pemilu untuk meraih banyak hati. ASN rentan melakukan politisasi.*

**A**SN rentan menjadi bulan-bulanan peserta pemilu karena integritas yang dipikunya, juga karena posisinya yang strategis di masyarakat untuk menarik banyak suara. Terlebih di ranah perguruan tinggi, seorang dosen memiliki nilai lebih yang tidak hanya sebagai tenaga pendidik di dalam kelas, namun juga menjadi *role model* mahasiswa. Mengintip keterlibatan ASN Unmul dalam politik tahun ini, kepada *Sketsa*, Agus Supriadi, staf dari kepegawaian tenaga pendidik menuturkan bahwa sejauh ini ia tidak menemukan adanya laporan izin secara resmi dari ASN Unmul untuk terlibat dalam kegiatan politik, baik itu mencalonkan diri sebagai anggota legislatif atau sekadar ikut kampanye.

“Kalau pun ada yang ikut nyaleg, aturannya kan emang enggak boleh,” tegasnya.

Sedang prosedur seorang ASN yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif harus ada izin resmi dan mengikuti aturan yang berlaku. “Kecuali yang ikut partisipasi kampanye, itu di luar kita,” ucap Agus.

Beberapa regulasi telah mengatur dengan

tegas ihwal pelarangan ASN dalam keikutsertaan kampanye politik. Seperti yang termaktum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mengatur soal sanksi. Di antaranya ialah dapat berupa penundaan kenaikan gaji atau pangkat, penurunan pangkat, hingga pemberhentian secara tidak hormat. Ditemui *Sketsa*, Prof. Sarosa Hamongpranoto mengatakan bahwa ketika ASN ingin terlibat politik, maka harus rela untuk mengundurkan diri terlebih dahulu dari jabatannya.

“Kalau masuk politik enggak boleh cuti, harus berhenti (dari ASN),” bebernya.

Sebagai seorang akademisi Unmul yang telah mengabdikan lebih dari 40 tahun, Prof. Sarosa mengatakan bahwa ASN merupakan abdi negara yang harus memiliki loyalitas pada negara. “ASN harus tetap netral dari yang berkaitan dengan perpolitikan,” ungkap Wakil Rektor III pada 1985 itu.

Di sepanjang perjalanannya, Unmul telah mengantongi beberapa ASN yang memilih kancah politik dan mengundurkan diri dari jabatannya.

Beberapa di antaranya ialah Rusmadi Wongso, Awang Faroek Ishak, dan mendiang Herlan Agussalim. Tokoh politik Rusmadi pernah menjabat di berbagai struktural Unmul, salah satunya ialah pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Pertanian (Faperta) pada 2005 hingga 2008 silam. Kemudian ditarik oleh Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Awang Faroek Ishak untuk diperbantukan di pemerintahan provinsi. Sedang statusnya masih ASN, ketika Rusmadi mencalonkan diri sebagai gubernur Kaltim, maka saat itulah ia harus mengundurkan diri dari ASN.

“Dulu kan dia ditarik gubernur, diperbantukan di pemerintahan provinsi, jadi statusnya masih PNS. Begitu mencalonkan menjadi gubernur, maka harus mengundurkan diri,” terang Dekan FISIP 2002 itu.

Mendiang Herlan Agussalim juga awalnya seorang ASN Unmul dan kemudian mengundurkan diri untuk melanjutkan diri sebagai politikus. Perjalanan karier politiknya ialah menjabat Ketua DPRD Kaltim periode 2004-2009. Sedangkan Awang Faroek Ishak pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) pada 1982 silam. Kemudian berhenti dari ASN dan menjadi anggota DPR dari partai Golongan Karya (Golkar).

“Begitu dia masuk DPR mewakili Golkar, dia berhenti karena masuk perpolitikan,” ujarnya.

## Tapak Tilas Keterlibatan ASN

Berbagai aturan mengenai netralitas ASN sering disuarakan. Melalui peraturan ini diharapkan dapat mencegah peserta pemilu dalam menggerakkan ASN sebagai alat kepentingannya. Netralitas ASN dapat dikatakan sebagai amanat reformasi, sebab berkaca dari sejarah saat era orde baru di bawah tampuk kepemimpinan Soeharto 'menggunakan' ASN atau PNS sebagai mesin kekuasaan.

“Zaman orde baru ASN berpolitik juga, dulu

ASN atau yang dulu disebut PNS wajib masuk Golkar, waktu itu belum menjadi partai. Begitu Golkar menjadi partai politik, sejak itu PNS tidak boleh berpolitik di situ,” tutur Prof. Sarosa.

Dilansir dari *historia.id*, pada 1956, Soekarno mengusulkan untuk membubarkan partai-partai sebab sering terjadi pergesekan perebutan kekuasaan yang menimbulkan konflik. Sehingga Soekarno mengusulkan golongan fungsional atau Golkar yang tidak ada di bawah pengaruh politik mana pun. Kemudian berdiri Sekretariat Bersama (Sekber) Golkar sebagai wadah bernaungnya golongan fungsional atau Golkar.

Setelah lengsernya kepemimpinan Soekarno, Soeharto memegang kendali Sekber Golkar yang mejadi cikal bakal bedirinya partai Golkar dan menjadikannya sebagai kendaraan politik pada saat itu. PNS dan militer digunakan sebagai kunci kemenangan Soeharto pada pemilu dengan menetapkan peraturan monoloyalitas--adalah kebijakan yang mewajibkan seluruh PNS untuk berpihak dan menyuarakan aspirasi politik pada Golkar--yang menguntungkan Golkar.

Setelah runtuhnya rezim Soeharto, praktis kebijakan itu dicabut sebab banyaknya kontroversi yang muncul. Kini ASN bebas menentukan hak pilih dan tidak terikat untuk menentukan wadah mana yang akan menjadi aspirasi politiknya. Namun tetap menjaga idealisme dan juga netralitasnya sebagai ASN.

● PENULIS: USWATUN HASANAH, MAHARANI RAMADHANTY,  
HILDA ANNISA N.F, SITI JUBAIDAH  
EDITOR: FADIAH ADLINA

Foto: Istimewa

**Mohammad Taufik**  
Ketua KPUD Kaltim  
2014-2019

## Taufik: Sudah Terlalu Banyak Teori, Saatnya Praktik

*Menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu bagi Taufik juga merupakan bentuk pengabdian kepada negara. Dari sana, banyak pengalaman yang didapat untuk dibawa ketika kembali menjadi pengajar.*

**M**ohammad Taufik, sudah menjadi dosen di prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) sejak 2005 silam. Rasa ingin tahu mendorongnya untuk mencoba mengabdikan tidak hanya melalui kampus. Niat menyelesaikan terselenggaranya pesta demokrasi di Kalimantan Timur (Katim) jadi motivasinya. Ia kemudian menjabat sebagai ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggantikan Ida Farida. Sebelum akhirnya ia kembali menjadi dosen setelah masa tugas yang berakhir pada awal 2019 ini.

*Sketsa* berkesempatan mewawancarai Taufik. Menggali terkait perjalanan kariernya hingga saat ini. Berikut petikan wawancara dengan Taufik.

### **Seperti apa awal mula menjadi bagian dari KPU Kaltim?**

Di tengah perjalanan menjadi dosen, di tahun 2014 saya mengikuti tes menjadi komisioner KPU Kaltim. Kemudian ditunjuk menjadi ketua.

### **Apakah saat itu tetap menjadi dosen?**

Saya mengambil cuti di luar tanggungan

negara, karena penyelenggara pemilu membutuhkan waktu yang banyak sehingga tidak bisa diberi waktu untuk mengajar. Setelah periode 2014-2019, Februari kemarin berakhir. Karena masa tugasnya 5 tahun, saya kembali menjadi dosen dan tidak mendaftarkan diri sebagai KPU lagi. Saya berpikir kalau semakin banyak orang yang terlibat sebagai penyelenggara pemilu, diharapkan semakin banyak pula yang peduli dengan pemilu.

### **Apa yang menjadi alasan Anda untuk terlibat sebagai penyelenggara pemilu?**

Saya ingin berbuat untuk Kaltim, mengingat sudah banyak teori-teori yang dipelajari sehingga saya ingin mengetahui seperti apa penyelenggara pemilu dalam bentuk praktik. Ada tiga tugas dosen dalam perguruan tinggi. Pertama, pendidikan dan pengajaran, hal ini sudah dilakukan secara rutin dalam kelas. Kemudian ada penelitian dan riset serta tugas, dan yang terakhir yaitu pengabdian kepada masyarakat. Saya menganggap bahwa sudah cukup lama mengajar sehingga ingin melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan mengambil peran sebagai penyelenggara pemilu. Saya ingin penyelenggaraan pemilu di Kaltim menjadi lebih baik.

### **Apa pengalaman yang tidak terlupakan selama menjadi Ketua KPU Kaltim?**

Banyak. Salah satunya Alhamdulillah kita

dapat penghargaan. Itu artinya kinerja kita dihargai oleh Gubernur. Pemilu 2018 berjalan dengan baik, lancar, tidak ada gugatan dan tidak ada perhitungan suara ulang serta tidak ada pemilu susulan. Pasangan calon yang berkompetisi juga menerima sehingga tidak ada gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK. Itu artinya kerja teman-teman di KPU baik tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau di TPS kabupaten/kota berjalan baik. Sehingga pemerintah lewat gubernur memberi apresiasi kepada KPU sebagai penyelenggara, itu berarti kita termasuk daerah yang menjalankan pemilu dengan baik selama 5 tahun terakhir.

## **Sebagai dosen yang pernah berkecimpung sebagai penyelenggara pemilu, bagaimana pandangan Anda terkait aturan ASN tidak diperkenankan berpolitik praktis?**

Kalau berbicara tentang ASN tidak boleh berpolitik secara praktis 'iya'. Tapi jika PNS atau ASN tidak berpolitik, tidak mungkin ya. Semua makhluk di dunia pasti berpolitik. Kalau politis kan yang tidak berpikir tentang kepentingan. Tapi saya pikir semua manusia pasti punya kepentingan. Sekarang inikan menjelang pemilu 2019, waktu kampanye cukup lama hampir 7 bulan, berakhir pada tanggal 13 April, apalagi akan ada kampanye terbuka. Memang menurut UU ASN disebutkan bahwa netralitas ASN itu harga mati, artinya diharapkan ASN tidak melakukan politik praktis. Keberpihakan ASN terhadap pasangan calon ataupun keterlibatan dalam partai politik itu sangat dilarang. Misalnya ketika mencalonkan diri sebagai bupati/wali kota atau gubernur maka ia harus berhenti dan mengundurkan diri dari ASN. Itu adalah syaratnya, artinya ASN harus netral. Tentunya aturan itu dibuat berdasarkan fenomena sebelumnya, bahwa kebanyakan incumbent yang ikut bertanding maka dampaknya luar biasa kalau terjadi mobilisasi ASN.

Terkait kampanye, sebetulnya ASN boleh ikut. Tetapi ada syarat tertentu, misal mereka hanya hadir untuk mendengarkan visi misi yang disampaikan dan tidak menggunakan baju ASN, itu boleh. Mereka memiliki hak suara jadi perlu mengetahui tentang sosok yang akan dipilih. Mereka boleh ikut kampanye, syarat-syaratnya adalah tidak menggunakan atribut sosialisasi kampanye atau misalnya mereka menjadi petugas atau pelaksana kampanye. Kalau berfoto kemudian ada tanda tertentu yang mengindikasikan dia berpihak, maka ada regulasinya di UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam Pasal 80 terdapat aturan tidak boleh berpihak karena ada sanksi kalau melanggar. Sanksinya bisa berupa penundaan pangkat dan gaji atau penurunan kepangkatan bahkan sanksi lebih berat bisa diberhentikan dengan tidak hormat. Sanksi ini banyak, ada sanksi administratif dan sanksi pidana. Kalau sanksi administratif biasanya diberikan dari moral karena keberpihakan yang kita lihat, sedangkan kalau sanksi pidana bisa lanjut diproses ke Komisi Etik ASN.

## **Beberapa waktu lalu mahasiswa melakukan aksi menuntut kinerja KPU dan Bawaslu yang dinilai belum maksimal, bagaimana tanggapan Anda?**

Kalau ada tuntutan dan dukungan apalagi dari kelompok masyarakat, saya pikir wajar saja dalam negara demokrasi adanya kelompok masyarakat seperti itu. Saya pikir hal tersebut positif, yang penting dalam memberikan tuntutan dan dukungan atau aspirasi disampaikan melalui jalur yang tepat. Datang ke KPU, berarti mereka ingin kinerja yang lebih baik. Saya pikir ini bukan hinaan ataupun teguran melainkan obat untuk teman-teman. Makanya kita tantang balik ini, apa yang sudah mereka perbuat untuk negara. Ini saatnya negara membutuhkan kalian sebagai penyelenggara pemilu.

**Selama menjabat sebagai ketua, apakah Anda pernah menerima tuntutan seperti itu?**

Pernah didemo beberapa kali, ya kita terima dengan baik, saya di depan. Mereka menyampaikan aspirasi dan tuntutan. Apabila tuntutannya masuk logika, masih bisa kita jawab ataupun ditampung sementara.

**Setelah pernah terlibat di badan yang aktif dalam pemilu, saat ini adakah langkah-langkah yang Anda lakukan untuk mengajak dosen dan mahasiswa untuk turut serta dalam pemilu?**

Pasti, sebagai warga negara yang baik kita mengingatkan kepada masyarakat terutama orang terdekat bahwa hak memilih harusnya digunakan dengan baik. Karena meskipun kita punya KTP tidak berarti kita warga negara. Hak untuk bisa memilih itu hak istimewa yang diberikan oleh negara setiap 5 tahun sekali, sayang kalau tidak digunakan. Sudah lama saya mengajar, memastikan diri atau para

dosen untuk mendukung penyelenggaraan pemilu Kaltim yang lebih baik.

**Adakah hal atau nilai yang dapat Anda bagikan setelah menjabat di KPU?**

Yang jelas sebagai penyelenggara pemilu di tingkat provinsi, banyak pengalaman yang saya dapat dan tidak bisa disebutkan satu-satu. Bahwa menjadi penyelenggara pemilu itu tidak mudah, butuh kerja keras dan butuh lebih banyak lagi belajar. Jadi saya mengimbau generasi muda supaya jangan hanya bicara dan berteori, tetapi juga ikut mengabdikan diri sebagai penyelenggara pemilu. Inikan pemilu serentak, harusnya semua pemuda terlibat secara aktif. Syarat menjadi penyelenggara sekarang 17 tahun ditingkat TPS.

- **PENULIS:** ANNISA A'YUN NURSANIA,  
MUHAMMAD FAJAR SAPUTRA, FADIAH ADLINA  
**EDITOR:** WILLIAM MALIKI

***“Generasi muda jangan hanya bicara dan berteori, tetapi juga ikut mengabdikan diri sebagai penyelenggara pemilu.”***  
*-Mohammad Taufik*

FOTO: Dok. Pribadi

**DERVIANSYAH**

Menteri Sosial Politik  
BEM KM Unmul 2019

## Menjaga Muruah dan Netralitas Kampus

Tahun 2019 ini menjadi momen bersejarah dalam pesta demokrasi Indonesia. Di mana pemilihan umum, baik itu calon legislatif dan calon presiden di gelar secara bersamaan. Kurang lebih 7 bulan tahapan proses pemilu 2019 telah berlalu dengan suasana yang tegang serta ada pula lelucon yang terjadi. Hal ini menjadi nilai tersendiri untuk pemilu yang selalu asyik untuk diperbincangkan.

Jika kita melihat bersama rekam jejak pemilu di Indonesia, yang dimulai sejak 1955 di masa pemerintahan Soekarno. Dari tahun 1955 sampai dengan 2019 sejarah pesta demokrasi di Indonesia sudah cukup panjang. Tentu dalam proses demokrasi yang telah berjalan, banyak sekali perubahan dan perbaikan demi terciptanya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, (Luber) serta jujur dan adil (Jurdil).

Tentunya masyarakat menjadi elemen yang berperan penting dalam proses pemilu 2019. Ada sekitar 192 juta lebih yang terdaftar sebagai pemilih tetap. Maka dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang sangat banyak ini, diperlukan kontrol dari masyarakat untuk melahirkan pemimpin yang terbaik di negeri tercinta. Lalu bagaimana dengan peran

kampus dalam pesta demokrasi di Indonesia? Kita tahu dalam pesta demokrasi ini akan menentukan tidak hanya kepala negara tetapi juga lembaga legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten). Tentu peran kampus sangat strategis. Kampus seharusnya bisa menyampaikan pandangannya terhadap persoalan bangsa kepada seluruh calon yang maju, baik itu calon presiden maupun legislatif.

Kampus sebagai institusi pendidikan yang di dalamnya diisi orang terdidik dan kaum intelektual, maka muruah dan netralitas kampus harus tetap di jaga terkhususnya di Unmul. Sebagai kampus terbesar di Kalimantan Timur, Unmul harus bersih dalam politik praktis, terlebih jika itu dosen yang berstatus aparatur sipil negara (ASN), dan kampus juga merupakan instansi pendidikan. Berdasarkan Pasal 2 Huruf f Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Serta kampus sebagai instansi pendidikan juga di atur dalam UU Pemilu yang terperinci dalam pasal 280 ayat (1) Huruf h, UU NO 7 Tahun 2017, berbunyi pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas

pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Sementara penjelasan pasal 280 ayat (1) huruf H UU pemilu berbunyi: “Fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”. Atas Undang-undang yang ada, alangkah baiknya rektor bisa menyatakan sikap dan memastikan ASN dan kampus tidak terlibat politik praktis. Berdasarkan informasi yang beredar, dosen Unmul ada yang ditemukan terlibat politik praktis. Jika ini tidak segera diusut dan diatasi maka dapat mencoreng nama baik Unmul.



• ILLUSTRASI : Laili Ferrer Novelin, Freepik

Serta bagaimana peran mahasiswa dalam pesta demokrasi lima tahunan ini? Mahasiswa sebagai kaum intelektual dan generasi penerus bangsa sudah semestinya berpikir kritis dan bertindak secara konkrit demi perbaikan bangsa ke arah yang lebih baik. Kampus yang diibaratkan sebagai miniatur negara, yang di dalamnya terdapat sistem pemerintahannya masing-masing. Layaknya BEM, DPM, dan UKM sebagai pusat kegiatan mahasiswa yang berorganisasi di kampus, maka secara tidak langsung telah menerapkan nilai-nilai politik di dalamnya, yaitu demokrasi.

Maka paham-paham yang berkembang di dalam dunia kampus dapat mempengaruhi dalam meyakini sesuatu yang berujung pada sebuah pilihan gerakan. Memandang kampus tidak bisa lepas tanggung jawab terhadap masalah politik. Kampus harus bisa mengawal, mengawasi dan mengavaluasi pemilu 2019 sebagai momentum pergantian pemerintahan.

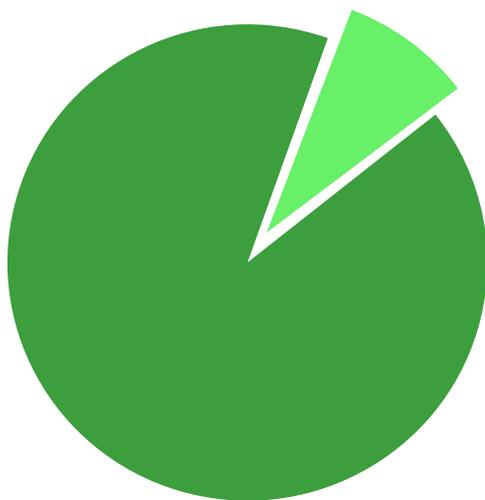
Maka muruah dan netralitas harus di jaga dalam kampus, ASN di kampus harus benar-benar mematuhi peraturan UU yang berlaku. Kampus sebagai instansi harus bisa menjaga nama baik. Mahasiswa juga mempertahankan idealismenya dalam sebuah gerakan. Buta dan tulinya kita dalam politik akan melahirkan kebijakan dan pemimpin yang tidak pro terhadap rakyat.

• PENULIS: DERVIANSYAH  
EDITOR: FADIAH ADLINA



**S**eperti tahun-tahun sebelumnya, dalam menyambut pesta demokrasi kerap diwarnai dengan berbagai penyimpangan. Setidaknya tercatat ada 103 pelanggaran yang diperoleh Bawaslu Kaltim berdasarkan situs Kaltim Today. Salah satu contoh permasalahan yang sedang hangat dibicarakan adalah keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kampanye politik.

Survei yang diadakan Divisi Penelitian dan Pengembangan (Litbang) LPM Sketsa bertujuan untuk mengetahui bagaimana antusias mahasiswa dalam menyambut Pemilu 2019, serta bagaimana kepekaan mahasiswa terhadap tindakan politik praktis yang terjadi di lingkungan kampus. Survei ini diadakan selama sepekan, terdapat 108 responden yang menjawab survei praktisi politik di unmul, survei ini terdiri dari 9 pertanyaan: 7 pertanyaan tertutup dan 2 pertanyaan terbuka. Berikut hasil dari survei praktisi politik di unmul.



### Apakah anda terdaftar sebagai DPT? (Daftar Pemilih Tetap)

Sebanyak 90% (97 dari 108 responden) koresponden telah terdaftar sebagai DPT (Daftar Pemilih Tetap), dan sisanya 10% (11 dari 108 responden) belum terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap.

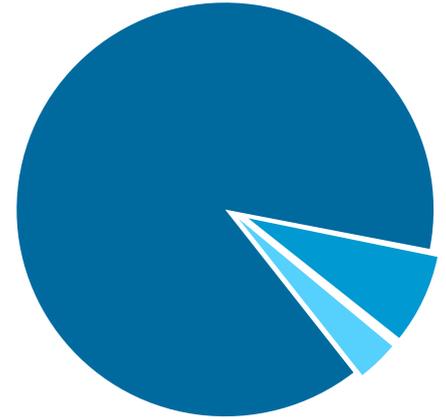
■ YA

■ TIDAK

## Apakah Anda akan menggunakan hak pilih Anda?

Dari diagram di sebelah kanan, dapat diketahui bahwa dari 108 koresponden, sebanyak 91 koresponden menjawab akan menggunakan hak pilihnya, sebanyak 15 koresponden tidak menggunakan hak pilihnya, dan sisanya 2 koresponden tidak menjawab pertanyaan ini.

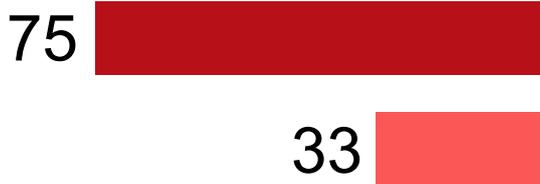
■ YA    ■ TIDAK    ■ TIDAK MENJAWAB



## Apakah anda antusias dengan perkembangan isu di tahun politik ini?

Dari diagram di sebelah kiri dapat diketahui bahwa dari 108 koresponden mahasiswa unmul, 75 orang diantaranya antusias dengan perkembangan isu politik di tahun 2019, dan 33 orang lainnya tidak antusias dengan perkembangan isu politik di tahun 2019.

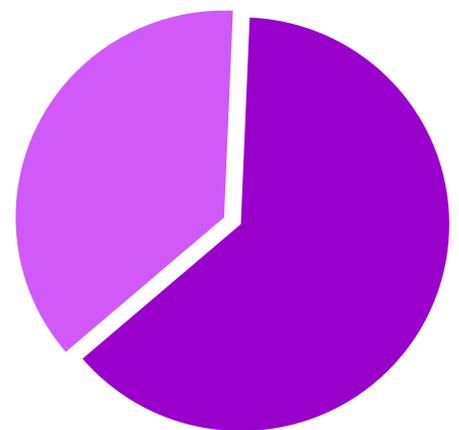
■ ANTUSIAS    ■ TIDAK



## Apakah Anda mengetahui informasi tentang caleg di daerah Anda?

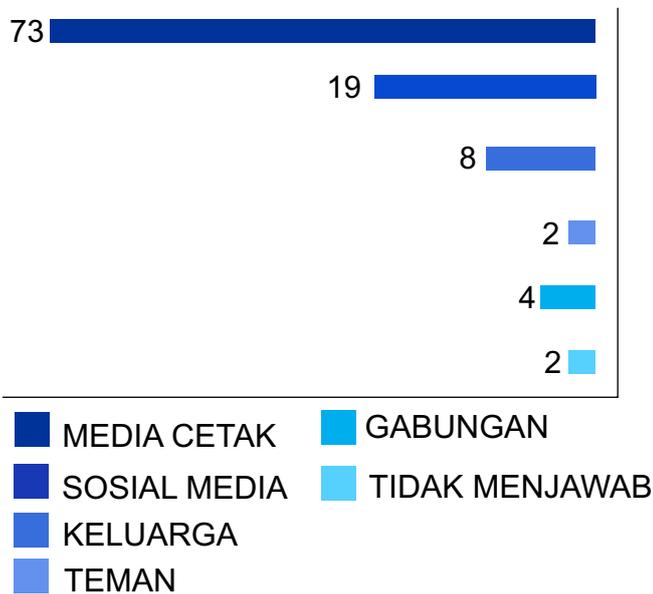
Pertanyaan nomor 4 ialah seberapa jauh koresponden mengetahui informasi mengenai caleg. Dari 108 jumlah koresponden secara keseluruhan, sebanyak 43% menjawab tidak. hal ini membuktikan bahwa jumlah tadi menunjukkan besaran koresponden yang tidak mengetahui sama sekali informasi mengenai caleg di daerah mereka. sedangkan 57% koresponden menjawab 'Ya', artinya jumlah ini adalah besaran koresponden yang mengetahui informasi terkait caleg di daerah mereka.

■ YA    ■ TIDAK



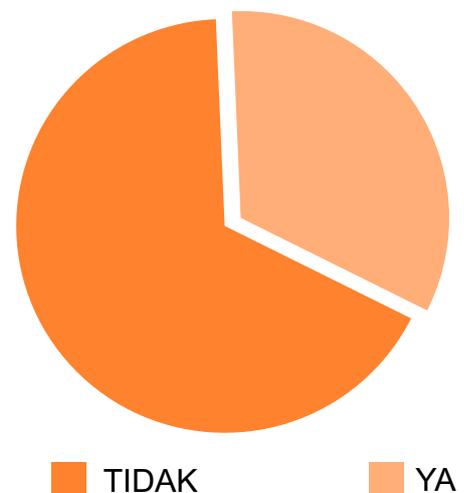
## Dari mana Anda mengetahui informasi tentang caleg di daerah Anda?

Beralih ke pertanyaan berikutnya, LPM Sketsa Unmul mencoba untuk menggali keterangan lebih lanjut. Pertanyaan nomor 5 kali ini diisi dengan pilihan media yang dapat memuat informasi mengenai caleg di daerah koresponden. Sebagaimana yang sudah tertera, sebanyak 73 orang menjawab media cetak seperti koran, majalah, spanduk, baliho, dan poster sebagai pusat informasi dari caleg terkait. 19 suara datang dari sosial media seperti internet, 8 koresponden menjawab keluarga dan 2 jawaban berasal dari opsi teman. 4 koresponden dalam survei kali ini menjawab dengan beberapa pilihan meliputi gabungan dari media social dan media cetak serta keluarga. Sedangkan 2 diantara 108 koresponden tidak menjawab.

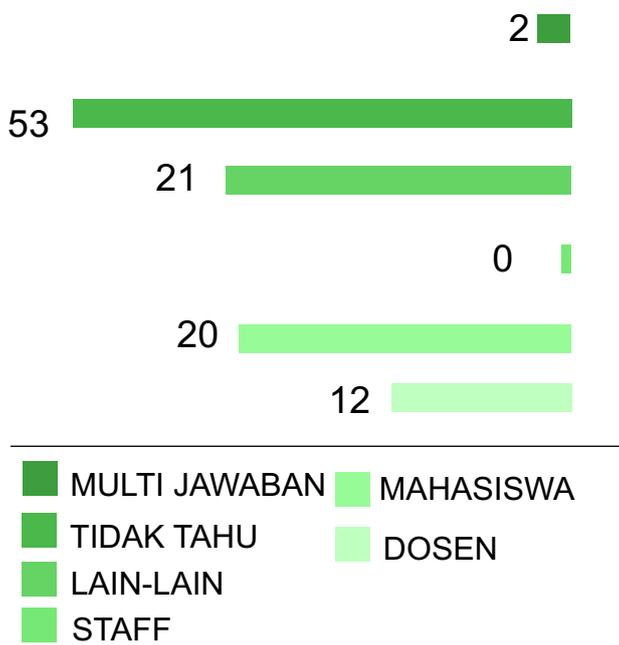


## Apakah Anda pernah melihat atau menemukan tindakan politik praktis di lingkungan kampus?

Pertanyaan ke enam diawali dengan praktik politik praktis yang pernah atau sedang terjadi di Unmul. Sebanyak 68% koresponden memilih jawaban tidak yang menandakan sebanyak 73 dari 108 koresponden belum pernah melihat atau menemukan tindakan politik praktis di Unmul. Sisanya, sebanyak 35 orang memilih menjawab ya, yang artinya 35% dari 108 koresponden pernah melihat atau menemukan tindakan politik praktis di kampus.

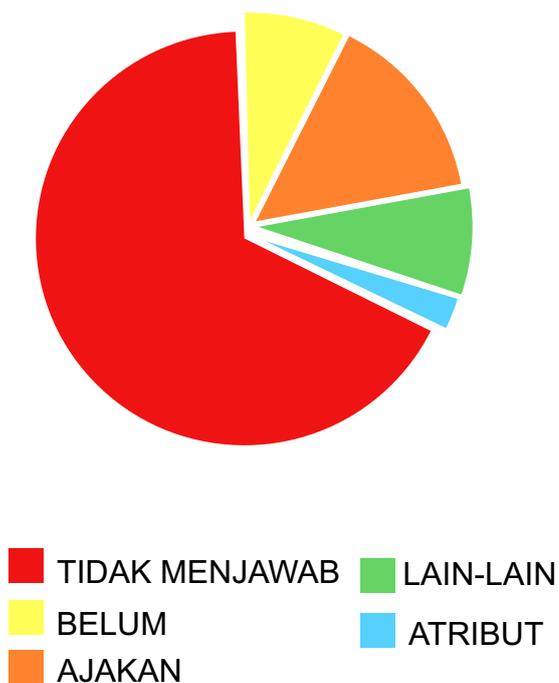


## Jika Ya, Siapa yang melakukan tindakan politik praktis tersebut?



Dari diagram di sebelah kiri, dapat diketahui bahwa dari 108 koresponden mahasiswa unmul, sebanyak 55 koresponden pernah menemukan tindakan politik praktis di kampus, sebanyak 12 koresponden menjawab tindakan tersebut dilakukan oleh dosen, 20 koresponden menjawab tindakan tersebut dilakukan oleh mahasiswa, 2 koresponden menjawab dengan beberapa pilihan yaitu dosen dan mahasiswa, dan dari 55 koresponden tersebut tidak ada yang melihat tindakan politik praktis yang dilakukan oleh staff/pegawai kampus. Sedangkan 53 koresponden lainnya tidak melihat adanya tindakan politik praktis di lingkungan kampusnya.

## Seperti apa bentuk tindakan politik praktis tersebut?

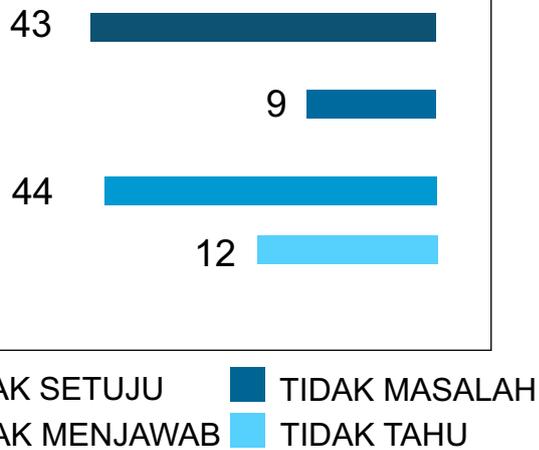


Berdasarkan diagram diatas, dapat disimpulkan dari 108 koresponden, kami menyeleksi yang termasuk kegiatan politik praktis, hasilnya ada 97 koresponden. Sebanyak 13% koresponden menjawab banyak menemukan kegiatan politik praktis berupa ajakan untuk memilih salah satu paslon, termasuk penggiringan opini hingga menjelekan lawan paslon.

Sedangkan 3% koresponden menemukan kegiatan politik praktis berupa atribut kampanye di lingkungan kampus, mulai dari mobil hingga stiker.

Sisanya sebanyak 8% koresponden menjawab belum menemukan, lalu sebanyak 10% koresponden menjawab lain-lain dan sebanyak 66 % koresponden tidak memiliki jawaban.

### Bagaimana pendapat anda tentang tindakan politik praktis di lingkungan kampus?



Dari total 108 koresponden, 43 diantaranya tidak setuju dengan tindakan politik praktis di lingkungan kampusnya, para koresponden berpendapat bahwa tidak seharusnya ada kegiatan politik praktis di kampusnya, tindakan tersebut tidak etis mengingat kampus adalah lembaga pendidikan dan adanya tindakan tersebut merupakan pelanggaran.

Sedangkan 9 koresponden menjawab tidak masalah dengan adanya tindakan politik praktis di lingkungan kampus. Sisanya, 12 koresponden menjawab tidak tahu, dan 44 koresponden lainnya tidak menjawab pertanyaan ini.

\*\*\*

# MELIHAT TREN CALEG MILENIAL

*Sebagai penerus bangsa, dalam pemilu ini generasi muda bukan hanya dituntut untuk ikut memilih. Mereka yang kompeten dan dipercaya juga berhak untuk maju menjadi kandidat yang dipilih. Meski dulunya kerap diragukan, namun kini generasi muda bahkan diberikan tempat khusus untuk menduduki kursi legislatif.*

**B**erjuang untuk kemajuan negara dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan terlibat langsung dalam proses pembuatan aturan dan kebijakan. Mereka yang ingin maju ke dunia parlementer tentunya harus siap mengemban amanah yang dititipkan. Iman Surya Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP, mengatakan hal ini bukan hanya tentang masa jabatan lima tahun, tapi juga tentang memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Menjadi pemimpin menurutnya harus otentik. Sebab pada dasarnya menjadi anggota legislatif harus dapat menyalurkan dan membela aspirasi masyarakat.

Belakangan ini, tak sedikit kita lihat wajah-wajah pemuda maju memperebutkan kursi wakil rakyat di pemilihan legislatif (pileg) hingga akhirnya nampak menjadi seperti sebuah tren tersendiri. Dengan turut melibatkan diri di panggung legislatif, pemuda dapat turut andil dalam menuangkan ide dan juga memaksimalkan perannya. Meski tidak semuanya memiliki latar belakang politik, namun dengan pengetahuan yang luas dan didukung dengan kepercayaan diri dapat menjadi modal awal untuk maju.

Iman mengatakan tiap caleg muda harus memiliki style yang terbentuk dalam dirinya. "Contohnya, dia harus tahu apa yang menjadi keinginan masyarakat, karena masyarakat zaman sekarang berpikir secara idealis," tuturnya.



Bukan soal besaran angka usia, fisik yang masih kuat, atau tampang rupawan. Di balik itu semua, caleg yang juga sering disebut caleg milenial haruslah memiliki pemikiran dan jiwa yang adaptif dengan lingkungan sekitarnya. Melalui tren caleg milenial, Imam mengatakan dapat mengubah pemikiran yang pragmatik menjadi komprehensif dan rasional. "Yang dibangun adalah pemikiran muda, bukan orang mudanya, yang hanya terobosan zaman," katanya.

Rekam jejak masa lalu juga menjadi salah satu modal penting bagi seorang yang mencalonkan dirinya di pileg ini. Begitu juga dengan caleg milenial, yang harus dapat membangun citra dan keyakinan kepada masyarakat agar berkenan untuk memilihnya. Dengan memaksimalkan upaya lewat jalur ini, Iman menyatakan tidak perlu lagi adanya politik uang bagi siapapun yang ingin maju.

Dwi Haryono selaku Komisioner Divisi Perencanaan Program Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Samarinda mengatakan, jumlah pendaftar yang mengajukan dirinya sebagai caleg di tahun ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini berhubungan dengan jumlah partai yang semakin bertambah.

Termasuk peningkatan caleg muda. Sementara itu, dikatakan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Mohamad Noor melalui *TribunKaltim.co*, fenomena tren caleg milenial

membuat dinamika politik bisa menjadi angin segar dalam perpolitikan di Indonesia, khususnya untuk pemerintahan, baik di pusat maupun daerah.

“Saya banyak bicara dengan tokoh muda Kaltim yang jadi calon legislator. Rata-rata mereka punya semangat dan motivasi kuat memajukan masyarakat. Soal peluang, caleg milenial ini harus bekerja lebih keras, karena belum punya nama. Baru mengorbitkan diri, perlu perjuangan lebih keras dari seniornya,” ucapnya.

Ditambahkan Noor, upaya caleg milenial memperkenalkan diri sudah luar biasa. Sesuai dengan tren milenial saat ini, rupanya para caleg muda menyasar simpati rakyat melalui media sosial. Dengan adanya media sosial, pertarungan antara caleg muda dengan yang sudah senior akan sengit. Melalui media sosial, caleg milenial akan punya banyak cara unik dan kreatif untuk memperkenalkan diri. Apalagi sasaran mereka adalah para pemilih muda juga, sebab itu peluang akan terpilih dalam pemilu mendatang akan lebih besar.

Melihat semakin banyaknya minat yang berkecimpung dalam politik, sedikit demi sedikit generasi muda mulai dilirik dan diberikan tempat khusus. Beberapa partai turut menyediakan kuota untuk diisi caleg muda. Sebut saja Partai Nasional Demokrat (NasDem), dilansir dari laman Liputan6.com, NasDem mendaftarkan hampir 70% kader muda untuk maju sebagai caleg. Strategi ini dipilih lantaran peminat NasDem didominasi oleh kaum muda. Selain itu ada juga Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang disebut-sebut sebagai partai kebangkitan politik anak muda. Sebab partai ini cenderung menggaet partisipan dari kalangan muda.

Rian Ernest, dari PSI mengatakan nilai lebih menjadi caleg milenial ialah pernah merasakan era diktator dan kebebasan. Sehingga dapat membandingkannya dengan cara pandang yang lebih ideal. Sebab menurutnya caleg milenial cenderung lebih idealis dalam menghadapi persoalan. Salah satu anggota legislatif yang berasal dari generasi milenial

adalah Ade Rezki Pratama merupakan anggota dewan termuda dengan usia 27 tahun. Pada pemilu 2014 lalu, ia terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019 mewakili daerah pemilihan Sumatera Barat melalui Partai Gerindra. Namanya mulai banyak dikenal saat memimpin rapat paripurna DPR RI dengan agenda pelantikan DPR RI 2014-2019 bersama Popong Otje Djundjungan yang merupakan anggota DPR RI tertua saat itu.

Ini menjadi bukti bahwa generasi milenial harus berani mengambil peran dalam membangun negara ini. Komposisi pemimpin muda memiliki kekuatan besar dalam perubahan negara, dengan memperjuangkan agar aspirasinya dapat terdengar dan membawa arah kemajuan. Tongkat estafet kepemimpinan bangsa harus terus berjalan kepada mereka yang kelak akan meneruskan.

“

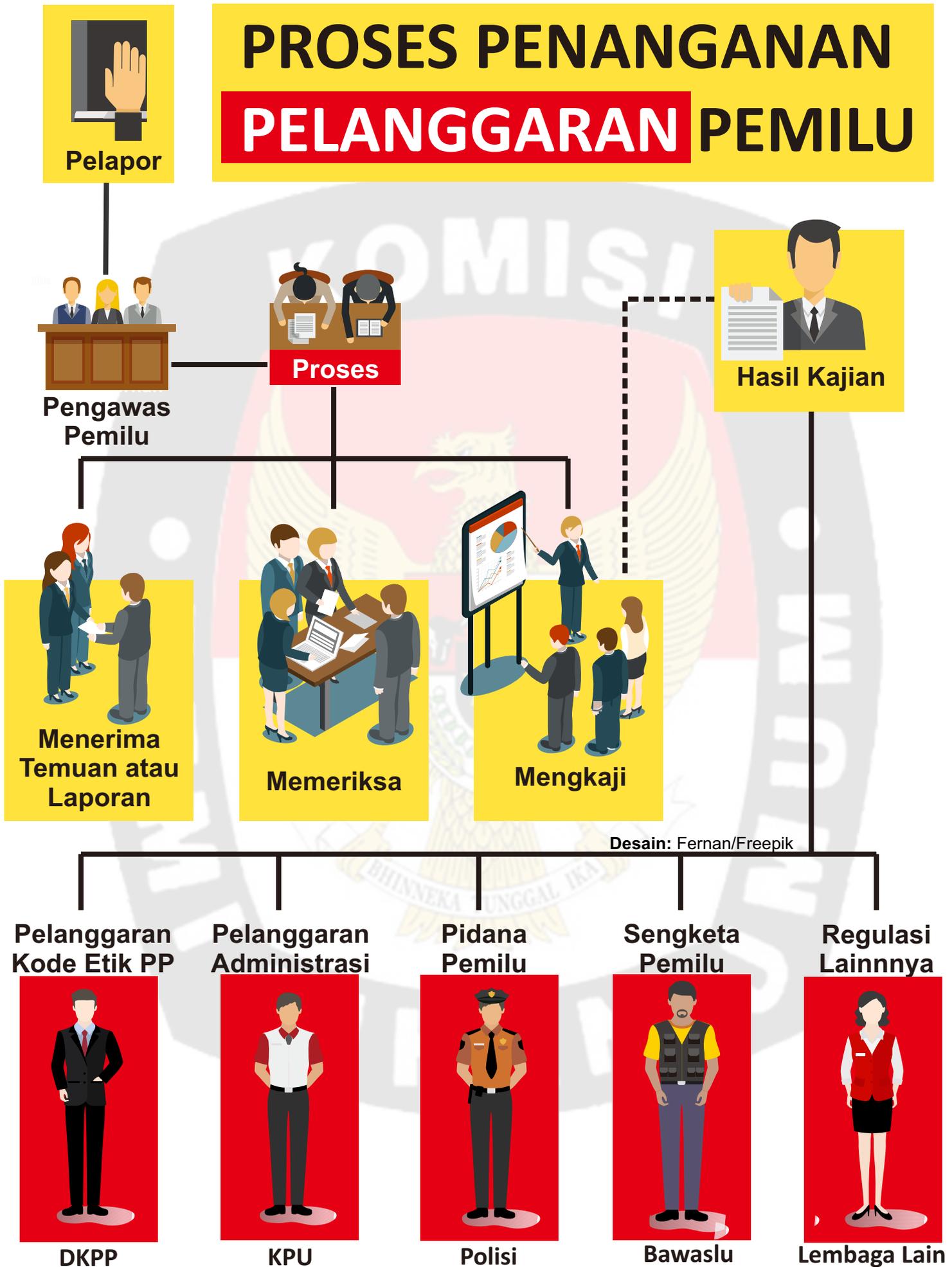
Kalian pemuda, kalau kalian tidak punya keberanian, sama saja dengan ternak karena fungsi hidupnya hanya beternak diri.

– Pramoedya Ananta Toer

”

- **PENULIS:** AULIA AGUSTINI, AYU INDAR, MUHAMMAD HEZKI ARIFANI  
**EDITOR:** NUR ELISHA, FADIAH ADLINA

## PROSES PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU



# Aksi Kamisan, Melawan Diam dengan Menuntut Keadilan

*Tak terhitung berapa sudah kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi hingga saat ini. Tak ingin diam dan terbungkam, berbagai aksi hingga pergerakan dilakukan untuk memperjuangkan keadilan.*

Sumber: Aksi Kamisan Kaltim

**A**ksi Kamisan, merupakan sebuah komunitas tidak terstruktur yang bergerak untuk memperjuangkan hak asasi manusia (HAM). Salah satu penggagasnya adalah Maria Catarina Sumarsih, ibu dari korban penculikan aktivis 1998, Bernardius Realino Norma Irmawan. Ia mempertanyakan penyelesaian kasus penculikan yang terjadi pada masa itu. Perempuan yang akrab dipanggil Sumarsih ini berulang kali datang ke Istana Presiden pada 2007 silam, sejak masa pemerintahan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Tak kunjung menerima tanggapan, Sumarsih bersama rekannya mengambil tindakan dengan berdiri di depan Istana Presiden mengenakan pakaian dan atribut serba hitam. Meski warna ini kerap dikaitkan dengan makna berduka, namun warna hitam dalam Aksi Kamisan melambangkan keteguhan iman. Tak lama, muncul berbagai aksi

solidaritas di berbagai daerah, hingga akhirnya bermunculan Aksi Kamisan di pulau-pulau lain di Indonesia. Begitu juga dengan Kaltim yang memulai Aksi Kamisan Kaltim 2017 di Samarinda. Tujuan adanya Aksi Kamisan Kaltim bukan untuk mengejar prestasi, lebih dari itu ialah untuk menyuarakan kasus pelanggaran HAM agar dapat tuntas dan tidak terulang kembali.

Aksi Kamisan terbuka bagi siapapun yang memiliki pandangan yang sama untuk memperjuangkan HAM, ruang hidup, hingga melawan penindasan. Orang-orang yang turut aksi disebut gerilyawan, sedangkan orang-orang yang di luar itu dianggap sebagai lawan yang siap untuk mereka hadapi. Romiansyah salah satu anggota Aksi Kamisan Kaltim menganggap Aksi Kamisan merupakan laboratorium belajar bagi anak muda, mahasiswa, dan seluruh elemen masyarakat.

mahasiswa, dan seluruh elemen masyarakat.

Aksi Kamisan menganut prinsip perlawanan tanpa kekerasan. Prinsip ini diadopsi dari Mahatma Gandhi. “Kami melakukan aksi dengan cara orasi, puisi, musik, dan tarian daerah. Itu adalah simbol dari perlawan-perlawanan kami. Kami tidak pernah melakukan tindakan dengan cara-cara kekerasan karena yang kami perjuangkan adalah HAM,” terang pria yang akrab disapa Nebo ini.



**Romiansyah**  
Anggota Aksi Kamisan Kaltim

Melalui Aksi Kamisan ini, berbagai kritik disampaikan terhadap pemerintah. Khususnya kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, yang sampai sekarang belum juga tuntas. Seperti pembantaian massal di tahun 1965, penculikan aktivis Munir dan Widji Thukul yang sampai saat ini belum memperoleh keadilan.

“Kami melihat ketika kasus itu belum diungkap, negara belum punya keberanian untuk mengungkap kasus itu maka sangat berpotensi terulang kembali,” ujar Nebo.

Dengan mengusung slogan 'Merawat Ingatan dan Menolak Lupa', seperti namanya Aksi Kamisan dilakukan setiap hari Kamis. Peristiwa pelanggaran HAM tidak bisa dilupakan dan harus diungkap oleh negara. Bagi Nebo, tidak mungkin negara bisa berdiri tinggi jika pondasi-pondasinya dari tulang belulang rakyatnya sendiri. Hal tersebut yang terus diperjuangkan oleh Aksi Kamisan Kaltim.

Aksi Kamisan Kaltim sampai sekarang belum pernah mengalami serangan secara fisik, namun serangan-serang verbal di media sosial sering diterima. Seperti saat mengangkat tema terkait *International Women's Day*, mereka dianggap mendukung komunitas Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (LGBT). Padahal mereka punya tujuan

tersendiri, yakni setiap manusia berhak memperoleh keadilan.

Dana yang diperoleh merupakan hasil sumbangan ketika aksi dijalankan. Dalam setiap aksi, ada celengan sukarela yang dijalankan untuk membiayai aksi, seperti untuk biaya listrik dan *sound system*. Berjalan tanpa struktur membuat anggota Aksi Kamisan Kaltim harus punya rasa peka untuk membangun dan terus melanjutkan komunitas ini. Nebo menambahkan diskusi yang dilakukan dalam Aksi Kamisan Kaltim selalu mengangkat tema nasional maupun isu-isu di daerah.

“Biasanya ide-ide muncul ketika kami diskusikan di warung-warung kopi. Dulu kita buat Aksi Kamisan Kaltim *Goes to Campus*,” tutur mahasiswa semester 4 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Samarinda ini.

Sejauh ini sudah sekitar 80 lebih kali Aksi Kamisan Kaltim digelar. Salah satu isu besar yang diangkat baru-baru ini adalah penambangan di kawasan Karst untuk pembangunan pabrik semen. Aksi Kamisan Kaltim sering pula melakukan diskusi dengan Aksi Kamisan di daerah lain seperti di Kalimantan Utara, Semarang, dan Palu. Kegiatan Aksi Kamisan juga selalu diunggah di media sosial, sebagai bentuk perjuangan yang selalu hidup.

● PENULIS: ANISA NUR ADNIN, SYALMA NAMIRA, HIJRANA,  
DAN M. ARIEF FATHUROZI  
EDITOR: WILLIAM MALIKI



**P**lagiasi sering di konotasikan sebagai salah satu tindakan pelanggaran etika dan bukanlah kejahatan. Padahal, secara perundang-undangan, tindakan plagiasi masuk kedalam UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Di mana dalam pembukaan undang-undang tertulis “Hak Cipta merupakan salah satu kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mempunyai peran strategis di dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Semua karya tulis, baik oleh akademisi maupun mahasiswa, secara otomatis mendapat hak cipta atas karya tulis yang dihasilkan. Dan plagiarism termasuk kedalam suatu jenis kejahatan yang kita sebut sebagai “kejahatan intelektual”. Dengan adanya UU Nomor 28 Tahun 2014 ini, negara secara konstituen dan otomatis mengatur dan melindungi penciptaan suatu karya tertentu.

Pada Oktober 2018 yang lalu, Universitas Mulawarman gegap gempita. Terdengar isu yang akhirnya menyebabkan salah seorang Ketua program studi mundur dari jabatannya yang prestigius. Terdapat tiga oknum dosen yang menjadi terduga plagiasi, yang kemudian menjadi isu hangat yang diperbincangkan dimana-mana.

Tidak hanya terjadi di Unmul, banyak kasus plagiasi yang membayangi kegiatan akademik di republik ini. Seperti dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UGM Anggito Abimanyu, dosen Hubungan Internasional UNPAR Anak Agung Banyu Perwira, bahkan tak tanggung-tanggung, Rektor Universitas

Negeri Semarang Fathur Rokhman, yang membuat ribuan mahasiswa Unes turun ke jalan. Mahasiswa secara tidak sadar juga melakukan plagiasi dewasa ini. Budaya copy paste dan juga “lihat dong, makalahmu” telah menjadi cikal bakal kejahatan yang lebih besar.

### Aplikasi Anti Plagiasi

PlagTracker adalah salah satu free application atau aplikasi gratis yang bisa kita gunakan untuk mengecek apakah sebuah karya ilmiah yang sedang ditulis mirip dengan karya yang kita buat. Aplikasi ini membantu kita untuk mendeteksi suatu dokumen atau karya ilmiah yang sudah diunggah di suatu website di internet. PlagTracker memiliki kemampuan untuk mengecek lebih dari 20 juta jurnal, baik tulisan akademis maupun halaman di internet.

Aplikasi ini dirintis oleh Devellar, sebuah perusahaan dari Ukraina yang mengembangkan plagiarism-tracking based app pada tahun 2011. PlagTracker sendiri sudah banyak digunakan oleh para pencipta karya ilmiah, sastra, mahasiswa, akademisi, bahkan blogger sekalipun. Mereka yang menggunakan aplikasi ini dapat mencari plagiasi karya, bahkan sampai penipuan konten, dimana konten yang lama, dikemas kembali sehingga nampak baru.

Cara penggunaannya cukup mudah. Pertama, copy tulisan yang ingin di cek isinya, lalu paste pada kolom “insert text” dan klik tombol merah bertulisan “start checking”. Kemudian, karya ilmiah kita akan secara otomatis muncul dan di bandingkan dengan beberapa karya lain.

Perbandingan karya ini pun juga mencantumkan website dan juga jurnal yang tertulis di internet, sehingga ketika laporan perbandingannya selesai, akan muncul kata-kata yang akan di bordir dengan tulisan merah yang akan dibandingkan, dengan suatu karya tertentu yang terindikasi sama atau pun persis di internet. Jadi, crosscheck antar berkas yang kita lakukan akan jitu dan akurat sesuai dengan jurnal ataupun karya tulis orang lain yang sudah beredar.

PlagTracker sendiri sudah banyak digunakan di berbagai negara dan universitas ternama di berbagai dunia, seperti Amerika, Finlandia, Inggris, dan Negara-negara Asia seperti Bangladesh,

Filipina, Pakistan dan Indonesia.

Jadi, dengan adanya aplikasi PlagTracker, kita tidak perlu khawatir jika terjadi plagiasi. Aplikasi ini akan menjamin originalitas karya tulis yang kita buat (atau yang orang lain buat), sehingga kata-kata “mencegah” menjadi kata-kata yang lebih baik daripada “mengobati”, sama seperti plagiasi, yang baiknya kita deteksi dahulu sejak dini.

• PENULIS: SAMUEL SINAMBELA  
EDITOR: CHRISTNINA MAHARANI

## IKUTI MEDIA SOSIAL KAMI



sketsaunmuldotco



LPM Sketsa Unmul



sketsaunmul.co



@sketsaunmul



@sketsaunmul



@sketsaunmul

# Secuil Kultur Semasa Kampanye

Desain: Faqih/Freepik



“Pikcah, lekas sikit,” ucap Mahde tak sabar pada langkah kakiku yang jauh tertinggal di belakang.

“Kau duluan saja lah, aku ndak santai ja,” sahutku dari belakang. Mahde melotot jengkel, tapi lekas memalingkan muka juga untuk berlari duluan. Benar-benar tak sabar rupanya anak satu itu, tapi tetap tak menggoyahkanku untuk melenggang dengan santai. Aku tinggal di Benar, Kampung Kutai yang sudah ada sejak 500 tahun lalu. Itu dari yang aku dengar. Daerah yang lumayan jauh dari perkotaan ini, hanya ditinggali dua RT. Yang mana setiap RT-nya memiliki 100 kepala keluarga, dengan jumlah anggota berbeda di tiap keluarganya.

“Kalau saya terpilih, Kampung Benar akan saya makmurkan,” teriak seseorang yang tak nampak fisiknya dengan lantang, suara itu berasal dari tengah desa tempat warga berkumpul sekarang. Tengah desa yang berada di lapangan luas depan sekolah dasar itu mulai tak terlihat karena ditutupi masyarakat kampung yang membludak. Bahkan masih ada yang berlarian ke samping kiri dan kanan ku, hendak menggabungkan diri untuk lebih memadatnya.

“Eh Cah, santainya awak ni. Nanti tak dapat tempat yang enak baru tahu rasa,” sambat Avang yang

berjalan cepat di sebelah kiriku. Tak ku sahut sambatannya, karena dia keburu pergi. Ku hentikan sebentar langkahku, ku amati lapangan yang sudah hilang tertutup warga. Penuh sudah. Kalau aku memaksa gabung berhimpitan di sana, hendak menyiksa diri namanya.

Pada bahasa kutai, awak digunakan untuk kata ganti kamu. Sedangkan ‘kita’ itu berarti saya.

Aku melihat sekitar, ada pohon rindang yang menenangkan. Pas lah ini untuk dijadikan tempat bersandar sementara, sembari mendengarkan beberapa orang berkoar. Ku tapaki jalan yang menanjak untuk sampai di sana, selepas itu langsung ku sandarkan pundak pada batang pohonnya. Kini dapat terlihat siapa saja yang berkoar tadi, walau masih tak terlalu jelas juga wajahnya.

Dari pakaiannya, aku dapat mengenali ayahku juga menjadi salah satunya. Berdiri menghadap warga. Bukan dia yang menyuarakan ajakan dengan lantang, ku lihat dia hanya beberapa kali menganggukkan kepala menimpali teriakan lantang yang di lontarkan. Mungkin dia berdiri di sana sebagai bukti kepada warga, kalau dirinya yang kepala kampung itu mendukung paslon yang sedang kampanye ini.

"Saya Pecut Sutaja dari partai Gelora Membara akan mengabdikan diri saya. Jika kalian memilih saya, akan saya pastikan pembangunan untuk kampung ini," teriak pria berbadan tambun dengan kulit kuning langsung yang mulai kemerahan karena teriknya matahari. Warga kampung menyambut kampanye itu dengan sorak-sorai lengkap dengan tepuk tangan. Membuat si tambun tersenyum semringah, mungkin dia merasa berhasil menggiring warga. Mungkin.

Walau daerahku ini masuk kategori kampung, pedalaman yang jauh dari berbagai hiburan perkotaan. Tapi, di masa menjelang pemilihan serentak tetap dipadati oleh kampanye beberapa kandidat. Ini adalah kampanye ketiga dalam minggu ini. Tak hanya itu, poster, banner, atau baliho banyak bertebaran di kiri kanan jalan sekitaran kampung. Tempat yang menjadi favorit adalah sekitaran jalan menuju sekolah dasar, mulai dari poster berukuran A5 sampai seukuran tiga kali lipat pintu rumah pun ada.

"Ui Cah, sorangan ja awak?" tanya Palik mengagetkanku.

"Oh awak Lik, iya lah sorang ja kita," sahutku sembari menggeser duduk sedikit.

"Eh kampanye kali ini ada itunya tak?" tanya Pelik sambil menyengolku.

"Ya menurut awak ja, biasa macam mana?" tanyaku balik.

"Berapa kali ini, Cah?" kejar Pelik, entah karena penasaran atau hanya ingin berbasa-basi.

"Kalau urusan berapa ayahku yang tau," jawabku sekenanya.

Karena aku anak kepala kampung, sudah sering kali menjadi bahan informasi bagi teman-teman sebayaku. Kalau ayah mereka akan menanyakan langsung pada ayahku lalu berlanjut menjadi bercerita, mereka juga seperti itu denganku.

Aku jadi teringat dengan perintah ayah yang menyuruhku mengumpulkan pemuda yang sudah

seharusnya memiliki KTP dan meminta fotocopy-annya bagi mereka yang punya.

"Palik, awak dah punya KTP?" tanyaku mendadak, selagi ingat pikirku.

"Ada lah, dari tahun lalu kita punya," katanya sembari menunjukkannya padaku.

"Kalau gitu, awak copy ya. Lepas tu kasih kita, oh iya kasih tau sida-nya jua," ujarku sembari menatap kumpulan warga yang mulai menyebar, pulang ke rumah masing-masing. Wah sudah usai ternyata, lebih cepat dari biasanya.

"Perintah ayah awak ya? Nanti kita kasih tau sida-nya," kata Palik sambil berdiri, hendak pergi juga ternyata.

"Iya, awak tau lah untuk pembagian uang itu, diminta 500 copy KTP. Bantu kita ya," kataku mengingatkan. Palik sempat membelalakkan matanya, mungkin sedikit terkejut dengan jumlah yang harus terkumpul. Tapi dia lekas mengangguk lalu pergi.

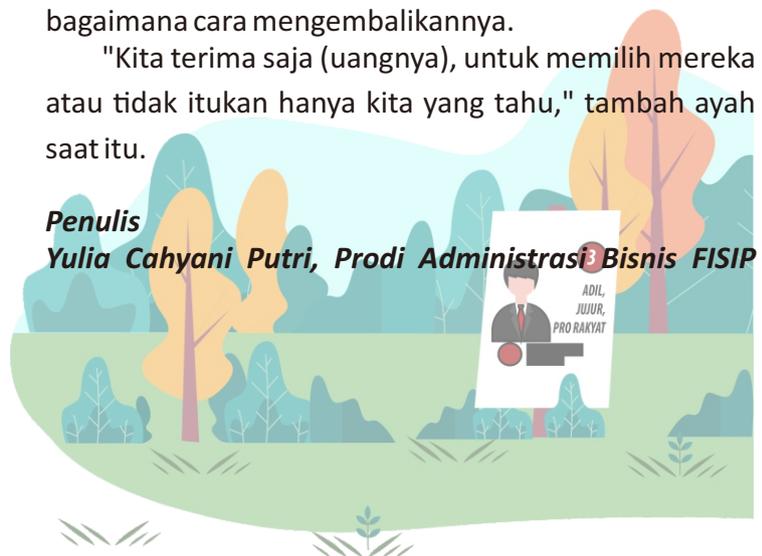
Kalau dipikirkan, entah habis berapa para caleg untuk biaya mereka berkampanye, menarik warga untuk memilih mereka dengan memberi sejumlah nominal. Untuk kampungku saja sudah mereka keluarkan banyak, belum lagi untuk daerah lain. Aku pernah berdiskusi dengan ayah mengenai hal ini, tapi kata ayah itu urusan mereka.

"Mereka memberi karena mereka butuh Cah, tak peduli sampai habis berapa pun," kata ayah waktu itu. Ayah juga menambahkan mereka seberani itu karena merasa jika mereka berhasil meraih posisi yang diinginkan, pasti uang itu akan kembali. Entah bagaimana cara mengembalikannya.

"Kita terima saja (uangnya), untuk memilih mereka atau tidak itukan hanya kita yang tahu," tambah ayah saat itu.

**Penulis**

**Yulia Cahyani Putri, Prodi Administrasi Bisnis FISIP**



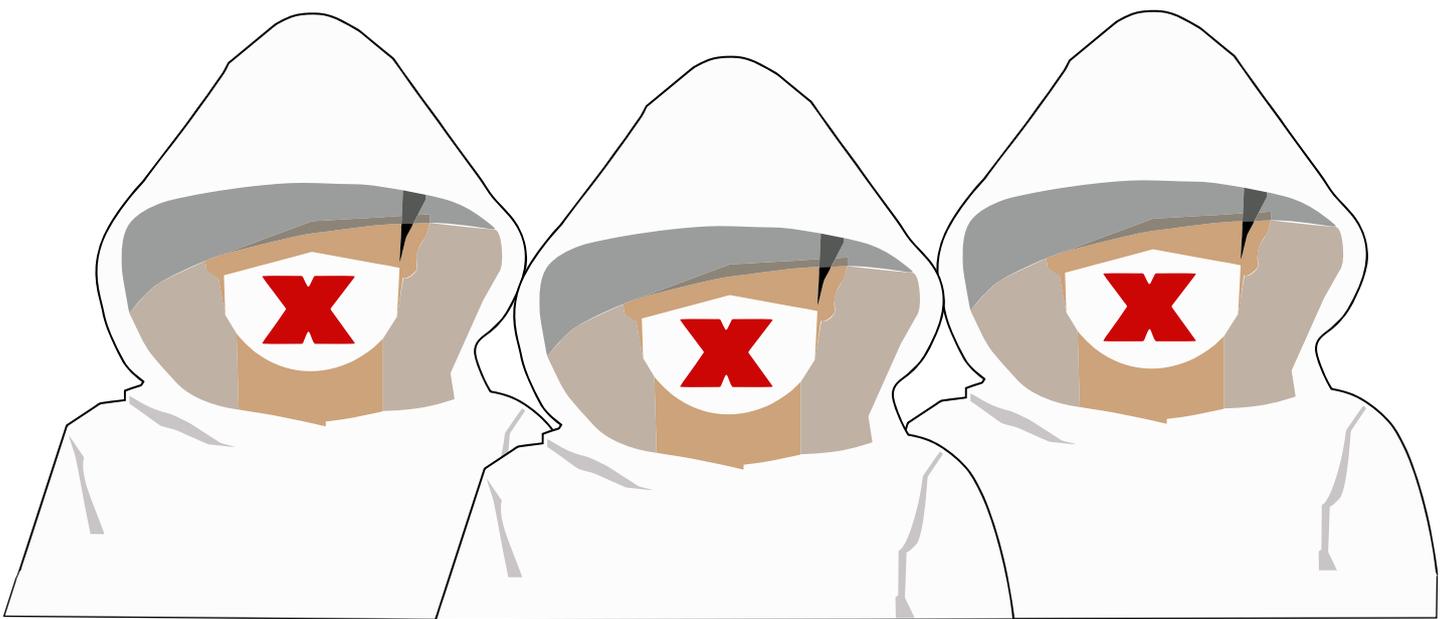
## Kaum Putih

*Pemerintah dan oposisi akan selalu menginginkan nikmat yang sama; kekuasaan.  
Berkali-kali kalian sangkal,  
hingga berbagai jiwa kalian culik dan penjarakan.  
Kurasakan kedua kaki kalian gamang;  
Takut nasi menjadi bubur.*

*Aku bukan apatis; bukan juga tak kritis.  
Sampai kapan adu kebodohan dan omong kosong kalian  
soal rakyat menjadi makanan sehari-hari kami?*

*Kami putih bukan berarti kami putih dan bebas munafik.  
Keberadaan kami,  
adalah tanda tanya besar yang harus kalian tuntaskan sebelum hari kiamat  
kalian tiba.*

***Ditulis oleh Christnina Maharani, mahasiswi Akuntansi FEB 2017***



Desain: Faqih/Freeplik



## KELUAR DARI ZONA NYAMAN, AINUR REBUT GELAR MAWAPRES

*Selasa, 19 Maret 2019, menjadi sejarah baru yang mengharumkan Fakultas Kedokteran (FK) Unmul. Salah satu mahasiswanya berhasil menyabet predikat mahasiswa berprestasi (mawapres) di tahun ini. Ainur Basirah Mulya, towaine Mandar (Srikandi Mandar), menjadi yang pertama dari FK yang berhasil melaju hingga meraih peringkat pertama di mawapres kali ini.*

**P**ereempuan ini menanti kedatangan Sketsa pada siang itu sambil duduk di bangku gazebo FK. Salah satunya tak lain karena ia harus memburu waktu agar tidak bertabrakan dengan kegiatannya yang lain. Ainur Basirah Mulya, dengan senyum yang terus tersungging di bibirnya menemani seruntut cerita yang ia bagikan. Tentang dirinya, kisahnya, dan potret perjalanan hidupnya hingga saat ini.

Ainur tumbuh seiring dengan kecintaannya dalam berorganisasi semasa sekolah di Mandar, Sulawesi Barat. Ainur kecil sudah aktif dalam kegiatan pramuka, tepatnya di bangku sekolah dasar (SD). Berlanjut di sekolah menengah pertama (SMP), Ainur melanjutkan kegiatan organisasinya di organisasi siswa intrasekolah

(Osis). Hingga akhirnya di menengah atas, kariernya dalam berorganisasi semakin menanjak. Ia menjabat sebagai ketua di organisasi yang berbeda, yakni Ketua Mathematic and English Club, serta Ketua Rohani Islam (Rohis).

SMA menjadi salah satu titik balik cerita hidup Ainur, yang membuatnya ditempa menjadi perempuan yang gigih. Di mana ia mengalami sebuah kejadian yang membuatnya termotivasi. Tamparan keras itu membuatnya bertekad untuk melakukan “balas dendam” dengan membuktikan eksistensi dirinya melalui prestasi. Terbukti, ia berhasil meraih berbagai prestasi gemilang di tingkat provinsi hingga nasional. Di antaranya juara 2 Lomba Parade Cinta Tanah Air tingkat provinsi, Lomba Debat Nasional di Ambon, hingga Lomba Parlemen Remaja Universitas Indonesia (UI).

### Keinginan Terhalang Restu Orang Tua

Kini, Ainur telah menjadi mahasiswi di FK Unmul. Meski begitu, diakuinya FK bukan menjadi tujuan awal. Mahasiswi pendidikan kedokteran umum ini mengatakan sebelumnya ingin terjun ke dunia politik atau hukum. “Awalnya aku pengen banget terjun ke dunia politik. Bermula dari

kegiatan Parlemen Remaja UI itu, soalnya enak ngomongin politik, asyik,” ungkapnya.

Namun sayang, keinginan Ainur untuk masuk jurusan hukum atau politik hanya sebatas angan-angan. Keinginannya terhalang restu, kedua orang tuanya tidak setuju. Ayah dan ibunya justru merekomendasikan Ainur untuk menjadi PNS saja. “Mereka penginnya aku jadi PNS, guru matematika gitu deh. Tapi banyak anggota keluarga yang jadi guru matematika dan rata-rata jadi guru gitu, aku bosan. Masa jadi guru matematika dan PNS lagi? Aku pengen keluar dari zona nyaman.”

Berawal dari keresahan itulah, ia memantapkan hati. Pendidikan Kedokteran menjadi pilihannya. Ainur memilih Kedokteran Universitas Hasanuddin (Unhas) sebagai pilihan pertama dan Kedokteran Unmul sebagai pilihan kedua di ujian SBMPTN-nya. Di pilihan kedua itulah Ainur kini melanjutkan pendidikan.

Semua berawal tidak mudah. Sulit bagi Ainur untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan barunya. *Shock culture* menjadi masalah pertamanya. Perbedaan kebudayaan dan kebiasaan di Samarinda dengan tanah kelahirannya di Mandar sempat menjadi kendala. Suasana kampung halamannya benar-benar ia rindukan. Ditambah iklim belajar mengajar di kelas yang sempat membuat dirinya tidak nyaman. Gadis ini sempat merasa Tak jarang ia menangis menyesali apa yang terjadi saat ini. Namun itu semua tak membuatnya goyah. Berbagai upaya dilakukan Ainur untuk tetap menjalankan pilihan yang diambilnya. Mulai dari memaksa diri untuk membaca buku, menonton video di Youtube, hingga mengganti metode belajar hampir setiap minggunya, untuk memudahkannya memahami pelajaran. Belum lagi ia merasa belum menemukan teman yang cocok, dan membuatnya merasa semakin sendiri di tanah rantau.

## Organisasi Menjadi Bagian Diri

Serentetan organisasi yang sudah ia lakoni sejak SD membuatnya merasa terbiasa dengan padatnya aktivitas. Tidak mengikuti kegiatan di luar perkuliahan membuatnya merasa hampa. Selama menjadi mahasiswa baru, Ainur bertekad untuk mengurangi kegiatan berorganisasi. Ia merasa pengalaman berorganisasi sudah cukup selama sekolah. Akhirnya ia hanya mengikuti lembaga dakwah kampus (LDK) di FK, sebagai sarana untuk belajar agama dan memperbaiki diri. Di sana, ia pelan-pelan menemukan teman-teman baru yang dapat mengisi kekosongan hari-harinya. Namun, hasratnya untuk terus beraktivitas tak padam. Ia turut melebarkan sayap untuk kegiatan di luar kampus.

“Waktu itu, aku punya passion, pengen mengajar dan berkontribusi buat masyarakat,” tuturnya.

Melalui panggilan passion-nya itulah, Ainur bergabung dalam kegiatan Unmul Mengajar (Unjar), sebuah program kerja yang digawangi oleh BEM KM Unmul. Melalui Unjar, Ainur pun terjun ke BEM KM dan dari situlah ia mengenal Dompot Duafa Indonesia dan Kampung Dongeng Etam.

Berangkat dengan niat menjadi manfaat dan konsistensi, di Dompot Duafa Ainur bertemu dengan banyak teman-teman baru. Ia juga turut menjalin relasi dengan para pejabat. Begitu juga dengan di Kampung Dongeng Etam, ia merasa menemukan keluarga baru. Melalui Kampung Dongeng ini, ia memiliki seorang ibu angkat bernama Ibu Wati. Sosok Ibu Wati menjadi mentor sekaligus ibu bagi Ainur.

Tidak sedikit orang sekitar mempertanyakan kesanggupan Ainur mengikuti berbagai kegiatan, baik itu di dalam maupun di luar kampus. Mengingat ia berada di fakultas yang terkenal padat, dengan kurikulum dan juga kegiatan akademiknya. Segala bentuk pertanyaan itu tidak diambil pusing, Ainur

memilih untuk terus gigih dan maksimal dalam berorganisasi dan tetap menyeimbangkan dengan akademiknya. Dari sinilah ia terus belajar hingga menjadi salah satu organisatoris andal. Lewat kegigihan dan keseriusannya, ia dipercaya menjadi koordinator umum untuk Dompot Duafa Indonesia daerah Kaltim. Melalui Dompot Duafa, ia melaksanakan kegiatan Bina Desa hingga ke tingkat nasional. Prestasi ini bahkan menjadi sorotan media-media di Kaltim. Tak hanya mengembangkan dirinya, Ainur yang juga mencintai kampung halamannya akhirnya membangun Kampung Dongeng di kampung asalnya, Mandar.

## **Sempat Minder**

Meski aktif kegiatan di sana-sini, bertemu dengan banyak orang, namun siapa yang dapat menjamin Ainur selalu percaya diri? Di salah satu kesempatan, Ainur sempat merasa minder. Tepatnya dalam Asean Student Summit 2018 di Korea Selatan. Ia menjadi satu-satunya perwakilan dari Unmul untuk berkunjung ke negara ginseng itu dengan biaya penuh dari fakultasnya.

“Deg-degan banget. Banyak delegasi dari berbagai negara yang ikut menghadiri, dan mereka semua rata-rata sangat kompetitif dan ambisius dalam forum internasional tersebut, Bahasa Inggris mereka bagus-bagus, sementara Bahasa Inggrisku biasa aja, masih patah-patah,” ceritanya.

## **Terpaksa Begadang dan Minum Kopi**

Sedari awal perkuliahan, Ainur tidak terpikirkan untuk mengikuti pemilihan mawapres, bahkan untuk mendaftarkan diri. Apalagi FK di tahun ini tidak melakukan seleksi, tidak seperti pemilihan mawapres sebelumnya. “(Mawapres) bertepatan dengan ujian, fakultas enggak sanggup mengadakan. Kabar seleksinya juga mendadak,” jelasnya.

Tetapi berdasarkan pertimbangan dekan

dan WD III FK, Ainur terpilih sebagai nama yang diajukan untuk ikut dalam pemilihan mawapres. Melihat banyaknya prestasi Ainur secara nasional bahkan internasional. Menerima kepercayaan dari fakultas, Ainur berupaya maksimal. Dari lima hari yang diberikan, Ainur memanfaatkan waktu untuk mempersiapkan segalanya dengan baik. Di balik sempitnya waktu persiapan, dan padatnya jadwal ujian serta organisasi, Ainur sibuk mencari dosen pembimbing untuk membuat karya tulis ilmiah (KTI) dan membuat video. Nantinya KTI dan video tersebut di presentasikan untuk menjadi nilai tambah, selain penilaian prestasi lainnya.

Karena dalam seleksi ini mewajibkan peserta untuk presentasi dalam bahasa Inggris, Ainur sampai meminta tolong kepada temannya, seorang native speaker, untuk membantunya dalam penyusunan presentasi. Ainur bahkan menceritakan, dalam mempersiapkan KTI ini, ia akhirnya terpaksa minum kopi dan begadang.

“Aku orangnya enggak suka kopi dan begadang, sesibuk apapun pasti nyempetin buat tidur dan istirahat. Cuma waktu itu akhirnya, mau enggak mau minum kopi, dadaku sampai sakit,” ujarnya terkikik.

Sampai akhirnya, hari itu tiba. Namanya dinobatkan sebagai Mawapres Unmul 2019 pada 19 Maret lalu. Setelah sebelumnya, ia melakukan presentasi di hadapan wakil dekan III dari sepuluh fakultas. Senang tentu menjadi perasaan dominan kala itu. Namun, ia menyadari ada tanggungan besar yang kini ia pikul. “Menjadi mahasiswa berprestasi ini, adalah amanah yang besar buatku, aku nggak pengen mengecewakan fakultas,” ujarnya.

## **Kunci Utama Kehidupan bagi Ainur**

Bagaimana Ainur dapat memperoleh semua pencapaian itu? Ainur rupanya memilih trik sendiri. Ia telah mengatur dan merencanakan semua targetnya. Mulai dari skala prioritas, kegiatan

iplanner book yang ia miliki.

Kedisiplinan, ketekunan, serta kejujuran menjadi kunci menurut Ainur. Ia mengaku dibesarkan dari keluarga yang disiplin dan sangat menjunjung tinggi kejujuran. Tak heran jika kini ia membiasakan diri untuk hidup seperti itu.

“Mahasiswa adalah gelar yang paling sakral. Mahasiswa harus bisa memaksa diri menjadi dewasa, dan tidak menyia-nyiakan waktu,” katanya. “Jangan cuma jadi mahasiswa yang duduk belajar dan ruang kuliah, masih banyak yang kita bisa dapatkan di luar ruang kelas” tutupnya.

● **PENULIS:** SAMUEL GADING  
**EDITOR:** NUR ELISHA



**Ibrahim**  
Ketua LPM Sketsa 2013-2014  
Mahasiswa FKTI

## *Selamat dan Sukses* Atas Kelulusannya

*“Segera bangun mimpi-mimpimu sekarang atau orang lain yang akan menyewamu untuk membangun mimpi-mimpi mereka.”*  
**-Farrah Gray-**



**Darul Asmawan**  
Anggota Litbang 2017-2018  
Mahasiswa FISIP

